

SKRIPSI

STUDI KETERSEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DIKELURAHAN BULOA KECAMATAN
TALLO

OLEH :

MOH. SYAFAR MADJID
45 94 042 068



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009

SKRIPSI

**STUDI KETERSEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DIKELURAHAN BULOA KECAMATAN
TALLO**

OLEH :

MOH. SYAFAR MADJID
45 94 042 068



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Studi Ketersediaan Prasarana Permukiman
Kumuh DiKel.Buloa Kec.Tallo
Nama Mahasiswa : Moh.Syafar Madjid
Stambuk : 45 94 042 068
Jurusan : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas : Teknik

Disetujui Komisi Pembimbing



Ir. Tommy SS. Eisenring.M.Si
Pembimbing I



Ir. Batara Surya, M.Si
Pembimbing II



Ir. Nursyam Aksa, M.Si
Pembimbing III

Mengetahui



Ir. Rudi Latief, M.Si



Ir. Muh. Ridwan. M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi ini, dengan judul : **Studi Ketersediaan Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah Kota Universitas "45" Makassar.

Dalam penyusunan ini, penulis banyak menerima masukan dan bimbingan, kritik dan sarana yang disifatnya membangun, serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Tommy SS. Eisenring, M.Si selaku pembimbing I, Ir. Batara Surya, M.Si selaku pembimbing II dan Ir. Nursyam Akssa, M.Si selaku pembimbing III, atas waktu yang telah diluangkan, serta arahan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis
2. Pihak Jurusan serta Dosen dan staf pengajar di Jurusan Perencanaan Wilayah dan kota Universitas 45 Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi
3. Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Tallo dan Kelurahan Buloa yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini
4. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi material dan moral sehingga penulis dapat menjalani studi hingga tahap penulisan ini

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas segala budi baik dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Lingkup dan Batasan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian	7
2. Populasi dan Sampel	9
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisa Data	11
G. Defenisi Operasional	11
1. Ketersediaan Prasarana Lingkungan	11



2. Manfaat Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi..	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Permukiman	24
B. Terjadinya Permukiman Kumuh	26
C. Pembinaan Permukiman	28
D. Konsep Lingkungan Permukiman yang Ideal	30
E. Prasarana Lingkungan Permukiman	35
F. Permukiman Kumuh	41
G. Kategori Permukiman Kumuh.....	44
H. Karakteristik Permukiman Kumuh	46
I. Bentuk-Bentuk Permukiman Kumuh.....	48
J. Upaya Penataan Pemukiman Kumuh.....	50
K. Kerangka Pemikiran	53
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Tallo	54
1. Letak dan Batas Administrasi Kecamatan Tallo	54
2. Aspek Fisik Wilayah Kecamatan Tallo	54
3. Aspek Kependudukan	57
4. Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi.....	58
5. Kondisi Prasarana.....	63
B. Tinjauan Umum Kelurahan Buloa.....	66



1. Letak Geografis.....	68
2. Tinjauan Aspek Lokasi Kawasan Kumuh	65
3. Tinjauan Kependudukan	69
4. Tinjauan Terhadap Kondisi Bangunan.....	72
5. Tinjauan Terhadap Kondisi Prasarana.....	74
6. Tinjauan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi.....	77
C. Karakteristik Responden.....	81
BAB IV ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN KUMUH	85
A. Analisis Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Buloa	85
1. Jalan	85
2. Air Bersih	89
3. Air Limbah	92
4. Prasarana Sampah	93
5. Prasarana Drainase	94
B. Manfaat Prasarana Lingkungan Permukiman terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat	97
1. Jaringan Jalan	97
2. Air Bersih	103
3. Air Limbah	105
4. Prasarana Persampahan	107
5. Prasarana Drainase	109

BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran – Saran	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persyaratan klasifikasi jalan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-6981-2004).	38
Tabel 2.	Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Tallo Dirinci per Kelurahan Tahun 2004-2008	58
Tabel 3.	Jumlah Fasilitas Perumahan di Kecamatan Tallo di Menurut Jumlah Kelurahan	59
Tabel 4.	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Tallo	60
Tabel 5.	Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tallo	61
Tabel 6.	Struktur Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Tallo .	61
Tabel 7.	Banyaknya Fasilitas Perdagangan dan Jasa Di Kecamatan Tallo	62
Tabel 8.	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kelurahan Buloa	70
Tabel 9.	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga di Kelurahan Buloa	70
Tabel 10.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Rumah di Kelurahan Buloa.....	71
Tabel 11.	Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Buloa	72
Tabel 12.	Angka Kematian Kasar di Kelurahan Buloa	72
Tabel 13.	Tingkat Kualitas dan Kelayakan Bangunan di Kelurahan Buloa.....	73
Tabel 14.	Tingkat Kepadatan Bangunan di Kelurahan Buloa	74
Tabel 15.	Jumlah Responded Berdasarkan Asal/Suku	81



Tabel 16. Jumlah Responden Menurut Kelompok Usia Kerja	81
Tabel 17. Jumlah Responden Berdasarkan Anggota Keluarga Yang Tinggal Dalam Rumah	82
Tabel 18. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	83
Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	83
Tabel 20. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan ...	84
Tabel 21. Perbandingan Antara Panjang Jalan Lingkungan Dan Setapak Dengan Standar	86
Tabel 22. Perbandingan Antara Lebar Badan Jalan Dan Perkerasan Jalan Dengan Standar SPM Tahun 2000	87
Tabel 23. Material Permukaan Jaringan Jalan di Kelurahan Buloa ..	88
Tabel 24. Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Air Bersih	89
Tabel 25. Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan Rasa/Tidak Berasa	90
Tabel 26. Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan Berdasarkan Bau/Tidak Berbau	90
Tabel 27. Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan Kejernihan	91
Tabel 28. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan MCK di Rumah	92
Tabel 29. Perbandingan Panjang Drainase Terhadap Standar Minimal	95
Tabel 30. Perbandingan Lebar Dan Tinggi/Dalam Drainase Terhadap Standar	96
Tabel 31. Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan	98
Tabel 32. Penggunaan Jalan Ke Tempat Kerja Dengan Menggunakan Sarana	99
Tabel 33. Penggunaan Jalan Ke Sekolah Dengan Menggunakan Sarana	99



Tabel 34. Manfaat Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kegiatan Sosial Responden	100
Tabel 35. Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Responden Untuk Membuka Usaha	101
Tabel 36. Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kenaikan Pendapatan	102
Tabel 37. Rata-Rata Pemakaian Air Perhari Dari Responden	104
Tabel 38. Tanggapan Responden Yang Pernah Diserang Penyakit Terhadap Kualitas Air	104
Tabel 39. Tanggapan Responden Terhadap Kondisi MCK Sendiri ..	106
Tabel 40. Alasan Sehingga Belum Memiliki MCK Sendiri Dari Responden	107
Tabel 41. Tanggapan Responden Terhadap Cara Pengelolaan Sampah	108
Tabel 42. Jarak Ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	109
Tabel 43. Tanggapan Responden Terhadap Kelancaran Aliran Drainase	110
Tabel 44. Deskripsi Responden Terhadap Kelancaran Kegiatan Sosial (Ke Sekolah) Dengan Adanya Genangan	111
Tabel 45. Deskripsi Responden Terhadap Kelancaran Kegiatan Ke Tempat Kerja Dengan Adanya Genangan	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Makassar	8
Gambar 2. Peta Administrasi dan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Tallo	55
Gambar 3. Peta Administrasi Kelurahan Buloa	67
Gambar 4. Peta Jaringan Air Bersih Kelurahan Buloa	75
Gambar 5. Peta Jaringan Jalan Kelurahan Buloa	78
Gambar 6. Peta Jaringan Drainase Kelurahan Buloa	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia menunjukkan kecenderungan terus dan berkembang sejalan dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, baik karena pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun tingkat urbanisasi yang tinggi.

Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta menyediakan lapangan kerja, menjadi faktor yang menyebabkan urbanisasi penduduk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan. Sebagai akibatnya terjadi penambahan penduduk, maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman di perkotaan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang tersebar di berbagai wilayah kota, baik yang direncanakan dengan baik maupun yang tidak/kurang terencana dengan baik.

Permukiman yang padat merupakan salah satu sisi kehidupan kota yang tak tersisihkan. Dari data statistik memperlihatkan, bahwa sekitar 75% penduduk perkotaan bermukim di kampung kota. Hal ini menurut Pontoh (1994) merupakan salah satu akibat meningkatnya

irama dan volume kerja di perkotaan sehubungan dengan kegiatan ekonomi kota yang semakin meningkat.

Meningkatnya fasilitas dan kegiatan ekonomi kota menurut Suhartono (1992) menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang-orang pedesaan untuk bermigrasi besar-besaran dengan motivasi lapangan pekerjaan. Dengan gaji mereka yang biasanya kecil, karena hanya berbekal pendidikan yang rendah, kebutuhan yang tertutup hanyalah makan dan sedikit sandang. Untuk perumahan, biasanya memanfaatkan daerah-daerah yang dianggap tak bertuan yang berada sedekat mungkin dengan tempat bekerja, dengan harapan adanya kemudahan dan menghemat biaya transportasi ke tempat kerja (Samiadji, 1993).

Seiring dengan meningkatnya fasilitas ekonomi kota, kompetisi penggunaan lahan mengakibatkan pula harga dan nilai lahan di wilayah perkotaan cenderung melonjak (Nasution, 1992). Sehingga sejumlah penduduk yang tidak mampu mengantisipasi arus pergerakan tersebut, terpaksa harus membangun permukimannya di dalam lingkungan apa saja, misalnya di bagian kota yang sering kena banjir, atau di daerah pinggiran sungai (Soewarno, 1991).

Gejala pertumbuhan ini semakin meningkat, juga karena aspek-aspek kehidupan sosial budaya para migran yang masih didasari oleh sifat-sifat kehidupan agraris, sifat yang masih berorientasi pada daerah asal, menyebabkan kondisi kota masih menyerupai desa. Sehingga



keadaan dan kualitas lahan dan lingkungan permukiman semakin menurun dengan terbentuknya permukiman-permukiman kumuh (Soewarno, 1991).

Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh dibiarkan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin rendah, memberi peluang kriminalitas, terganggunya norma tata susila, dan sering menimbulkan banjir (Komaruddin, 1996). Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegiatan pembangunan baru dan kegiatan peningkatan kualitas (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Perumahan dan Permukiman). Kegiatan peningkatan kualitas mengarah kepada perbaikan permukiman yang sudah ada, dari yang berskala ringan sampai pada skala yang perlu penanganan secara terpadu (Kirmanto, 2001). Pemerintah telah melakukan berbagai program perbaikan permukiman kumuh, tetapi menurut Wiyono dalam Komaruddin (1996), bahwa program/proyek mengalami kegagalan jika melalaikan pertimbangan manusiawi seperti faktor sosial dan budaya. Sesuai Komaruddin (1996), bahwa tidak mudah menangani masalah permukiman kumuh, karena perlu diciptakan kebersamaan, dan perlu didahului dengan survei sosial untuk mengidentifikasi karakteristik, kemampuan dan keinginan penduduk.

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan, baik itu ditangani oleh pemerintah, swasta maupun secara pribadi.

Kawasan perumahan dan permukiman yang direncanakan oleh pemerintah (PERUM PERUMNAS), swasta (REI), maupun secara pribadi oleh masyarakat golongan ekonomi menengah keatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar pada umumnya telah difasilitasi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai. Sementara kawasan perumahan dan permukiman yang tidak terencana umumnya ditangani secara pribadi, tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan sangat rendah dan tidak difasilitasi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sehingga mengakibatkan permukiman menjadi kumuh. Pada umumnya dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin dan menempati lahan-lahan permukiman baik yang legal maupun yang illegal. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh seperti ini selain merusak keindahan kota juga menjadi pusat pengangguran, sumber penyakit dan tindak kejahatan (Daldjoeni, 1996)

Salah satu faktor penyebab berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh adalah ketersediaan fasilitas lingkungan permukiman yang kurang dan berakibat kepada suasana kehidupan yang kurang sehat. Menurut Sugandhi (2002) kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia saat ini masih ditandai oleh (1) Belum mantapnya sistem penyelenggara termasuk sistim kelembagaan yang diperlukan (2) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau; dan (3) Menurunnya kualitas lingkungan

permukiman di mana secara fungsional kualitas pelayanan masih terbatas dan belum memenuhi standar yang memadai.

Masalah lingkungan permukiman kumuh hampir dapat dijumpai di setiap kota terutama kota-kota besar di Indonesia. Kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, tidaklah lepas dari permasalahan permukiman kumuh. Hampir semua kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Makassar memiliki kawasan permukiman kumuh yang lokasinya ada pada daerah pesisir pantai/sungai dan pusat kota.

Dari beberapa wilayah kecamatan dengan kondisi permukiman yang tidak memenuhi persyaratan akibat bangunan hunian sangat padat, jumlah penduduk yang sangat tinggi, keadaan sosial ekonomi yang rendah, dan tidak difasilitasi dengan prasarana dan sarana yang memadai, salah satunya adalah terdapat di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Buloa, pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan pada kawasan ini tidak hanya melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, juga diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha ekonomi dan sekaligus kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam memperbaiki lingkungan permukiman kumuh ini adalah melalui

program Peningkatan Kualitas Lingkungan. Program ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1999/2000, dimana kegiatannya terdiri dari : pembuatan jalan lingkungan dan jalan setapak, pembuatan saluran drainase, prasarana persampahan dan penyediaan air bersih. Oleh sebab itu perlu penelitian untuk mengetahui bagaimana ketersediaan prasarana lingkungan permukiman yang ada, dan manfaatnya terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan prasarana di lingkungan permukiman kumuh Kelurahan Buloa
2. Apakah ketersediaan prasarana lingkungan memberi manfaat terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ketersediaan prasarana di lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Buloa.
2. Mengetahui manfaat ketersediaan prasarana lingkungan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan prasarana lingkungan permukiman kumuh
2. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai unsur karakteristik prasarana lingkungan permukiman dan identifikasi tingkat kekumuhan pada permukiman penduduk di daerah perkotaan.

E. Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup yang meliputi:

1. Prasarana lingkungan yang akan dianalisis dalam penelitian ini difokuskan pada ketersediaan prasarana lingkungan permukiman meliputi : jalan, air bersih, air limbah, persampahan dan drainase.
2. Lokasi penelitian adalah permukiman kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar.



F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kawasan permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah semua kepala keluarga yang bermukim pada RW 01 dan RW 05 di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan jumlah 963 KK. Menurut Arikunto (2002) apabila jumlah subjeknya besar (lebih dari 100), maka jumlah sampel dapat diambil antara 10 % - 15 %. Berdasarkan pernyataan ini, maka jumlah sampel yang diambil adalah 96 KK, yaitu 10% dari jumlah populasi tersebut diatas.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dengan pertimbangan populasi dianggap homogen ditinjau dari latar belakang sosial ekonomi dan dari segi fisik bangunannya yaitu dengan memberi nomor urut nama semua kepala keluarga mulai dari 1 sampai dengan banyaknya subjek. Kemudian nomor subjek tersebut masing-masing dituliskan pada potongan kertas kecil lalu diundi dan diambil sebanyak sampel yang dibutuhkan, sehingga dapat memberi hak yang sama kepada setiap subjek (Kepala Keluarga) untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam hal ini diperoleh dari pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan

dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi terkait dan bahan kepustakaan yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yang meliputi identifikasi ketersediaan prasarana lingkungan yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas
- b. Kuesioner yaitu data terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden, dengan jawaban yang telah disediakan berupa pilihan (multiple choice).
- c. Wawancara yaitu wawancara secara mendalam dan langsung dengan masyarakat di lokasi penelitian, tokoh-tokoh masyarakat, pihak kelurahan dan instansi terkait.
- d. Dokumentasi yaitu merekam kondisi eksisting dilapangan secara visual dalam bentuk gambar dan foto-foto
- e. Kepustakaan yaitu mengumpulkan data primer dari instansi terkait dan studi literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Terhadap rumusan masalah pertama adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik analisis penjelasan secara mendalam dengan tabulasi dan membandingkan terhadap NSPM dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
- b. Terhadap rumusan masalah kedua adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan tabulasi dan mengetahui manfaat ketersediaan prasarana terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

G. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas terhadap variabel, indikator dan cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan defenisi operasional yang diuraikan secara terperinci.

Adapun variabel dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) komponen utama yang meliputi; (1) Ketersediaan prasarana lingkungan permukiman, (2) Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan terhadap kegiatan social ekonomi

1. Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman

Prasarana lingkungan permukiman dalam penelitian ini meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, MCK dan saluran

pembuangan air limbah, saluran drainase, serta sarana persampahan.

a. Jalan (jalan kendaraan dan setapak). Ditinjau dari variabel ketersediaan jalan lingkungan, maka indikator dan tolok ukur yang digunakan adalah :

1) Lebar Jalan, meliputi :

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar mencapai 80 – 90 %
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar mencapai 40 – 60 %
- e) Ketersediaan tidak baik jika kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %

2) Panjang Jalan

- a) Ketersediaan sangat tinggi jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 %
- b) Ketersediaan tinggi jika kesesuaian dengan standar mencapai 80 – 90 %
- c) Ketersediaan cukup tinggi jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %

- d) Ketersediaan rendah jika kesesuaian dengan standar mencapai 40 – 60 %
 - e) Ketersediaan sangat rendah jika kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %
- 3) Material Perkerasan jalan kendaraan
- a) Ketersediaan sangat baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 90 – 100 %
 - b) Ketersediaan baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal mencapai 80 – 90 %
 - c) Ketersediaan cukup baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 60 – 80 %
 - d) Ketersediaan kurang baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal mencapai 40 – 60 %
 - e) Ketersediaan tidak baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 0 – 40 %
- 4) Material jalan lingkungan dan setapak
- a) Ketersediaan sangat baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 90 – 100 %
 - b) Ketersediaan baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok mencapai 80 – 90 %
 - c) Ketersediaan cukup baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 60 – 80 %



- d) Ketersediaan kurang baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok mencapai 40 – 60 %
 - e) Ketersediaan tidak baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 0 – 40 %
- b. Air bersih, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah
- 1) Kepemilikan sambungan rumah
 - a) Ketersediaan baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 80 – 90 % dari jumlah responden
 - b) Ketersediaan cukup baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 60 – 80 % dari jumlah responden
 - c) Ketersediaan kurang baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 40 – 60 % dari jumlah responden
 - d) Ketersediaan tidak baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 0 – 40 % dari jumlah responden
 - 2) Kualitas Air bersih (rasa, bau, warna)
 - a) Ketersediaan sangat baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna ,tidak berbau , dan tidak berasa mencapai 90 – 100%
 - b) Ketersediaan baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 80 – 90 % dari jumlah responden

- c) Ketersediaan cukup baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna ,tidak berbau ,dan tidak berasa mencapai 60– 80 % dari jumlah responden
 - d) Ketersediaan kurang baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna ,tidak berbau ,dan tidak berasa mencapai 40 – 60 % dari jumlah responden
 - e) Ketersediaan tidak baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna ,tidak berbau ,dan tidak berasa mencapai 0 – 40 % dari jumlah responden
- 3) Kontinuitas pengaliran air bersih
- a) Ketersediaan sangat baik jika lama aliran air bersih antara 90 – 100 % dari 24 jam
 - b) Ketersediaan baik jika lama aliran air bersih antara 80 – 90 % dari 24 jam
 - c) Ketersediaan cukup baik jika lama aliran air bersih antara 60 – 80% dari 24 jam
 - d) Ketersediaan kurang baik jika lama aliran air bersih antara 40 – 60 % dari 24 jam
 - e) Ketersediaan tidak baik jika lama aliran air bersih antara 0 – 40 % dari 24 jam
- c. Air Limbah, dengan indikator dan tolok ukur yang digunakan adalah :
- 1) Kepemilikan MCK individu

- a) Ketersediaan sangat baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 90 – 100 % dari jumlah responden
- b) Ketersediaan baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 80 – 90 % dari jumlah responden
- c) Ketersediaan cukup baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 60 – 80 % dari jumlah responden
- d) Ketersediaan kurang baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 40 – 60 % dari jumlah responden
- e) Ketersediaan Tidak baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 0 – 40 % dari jumlah responden

2) Jumlah MCK umum

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80 – 90 %
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40 – 60 %
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %

d. Sampah, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah :

1) Jumlah TPS

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih**
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80 – 90 %**
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %**
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40 – 60 %**
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %**

2) Jumlah Gerobak sampah

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih**
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80 – 90 %**
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %**
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40 – 60 %**
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %**

e. Drainase, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah :

1) Panjang Drainase

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80 – 90 %
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40 – 60 %
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %

2) Lebar dan dalam /tinggi drainase

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90 – 100 % atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80 – 90 %
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60 – 80 %
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40 – 60 %

- a) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0 – 40 %

2. Manfaat Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi

a. Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap kegiatan sosial adalah prasarana lingkungan yang dapat mendukung kegiatan sosial seperti akses ke tempat kegiatan dan kesehatan masyarakat penghuninya. Variabel dan indikator pengukurannya adalah :

- 1) Jalan, dengan sub variabel dan indikator : Kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sosial dinilai dari
 - a) Moda transportasi yang dapat melewati, dinilai dari : pejalan kaki, sepeda, becak, motor, dan mobil
 - b) Melayani akses ke tempat kegiatan/aktifitas masyarakat
 - c) Interaksi masyarakat di dalam atau keluar permukiman
- 2) Air bersih, dengan sub variabel dan indikator : kualitas air bersih bagi kesehatan warga dengan dinilai dari : sering, jarang, dan tidak pernah terserang penyakit
- 3) Air limbah, dengan sub variabel dan indikator : Cara membuang limbah secara sehat :
 - a) Tempat membuang limbah, dinilai dari : laut, MCK umum, MCK individu
 - b) Jarak MCK dinilai dari: dekat, agak jauh, sangat jauh

- c) Sumber air bersih pada MCK dinilai dari: sambungan kran, sumur, tidak ada
- 4) Sampah dengan sub variabel dan indikator : Cara pembuangan dan pengangkutan sampah dinilai dari
 - a) Tempat membuang sampah :jarak dari rumah ke tempat pembuangan sampah
 - b) Cara pengangkutan sampah dari rumah ke tempat pembuangan sementara
 - c) Frekuensi pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir
- 5) Drainase dengan sub variabel dan indikator :
 - a) Kelancaraan pembuangan air hujan, dinilai dengan : banjir/sangat tergenang, agak tergenang, tidak tergenang
 - b) Kemudahan kegiatan sosial dengan ada tidaknya genangan
- b. Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap kegiatan ekonomi adalah prasarana lingkungan yang dapat memenuhi aktifitas ekonomi masyarakat penghuninya, dengan meningkatnya pendapatan dan lapangan kerja (usaha) setelah terbangunnya prasarana di sekitar lingkungan permukiman Variabel dan indikatornya adalah :

- 1) Jalan, dengan indikator :
Kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan ekonomi, dinilai dengan dampak keberadaan jalan dengan peluang membuka usaha dan peningkatan pendapatan.
- 2) Air bersih, dengan indikator :
Kecukupan pendistribusian air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pemanfaatannya.
- 3) Air limbah, dengan indikator
Pengelolaan limbah rumah tangga dengan penyediaan MCK dalam lingkungan permukiman.
- 4) Sampah, dengan indikator :
Persampahan dinilai dengan cara pengelolaan kegiatan pembuangan sampah dalam lingkungan permukiman
- 5) Drainase, dengan indikator :
Kelancaran kegiatan perekonomian dengan ada tidaknya genangan air



H. Sistmatika Pembahasan

Sistmatika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini pada umumnya merupakan keterkaitan terhadap ketersediaan prasarana pada lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo. Adapun uraian sistematika pembahasan, meliputi :

Bab I : **Pendahuluan**, menguraikan pokok-pokok kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan penulisan ini, sehingga

secara umum memuat tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian, lingkup dan batasan penelitian, metode penelitian dan defenisi operasional.

- Bab II : Tinjauan Pustaka**, menguraikan kerangka konseptual tentang permukiman kumuh dan ketersediaan prasarana penunjang, sehingga memuat tentang; pengertian permukiman, terjadinya permukiman kumuh, pembinaan permukiman, konsep permukiman yang ideal, prasarana lingkungan permukiman, permukiman kumuh, kategori, karakteristik, dan bentuk-bentuk permukiman kumuh, upaya penataan permukiman kumuh dan kerangka pemikiran.
- Bab III : Gambaran Umum Wilayah Studi**, menguraikan tentang karakteristik wilayah studi, baik secara makro maupun secara mikro, bahasan yang diuraikan meliputi gambaran umum wilayah Kecamatan Tallo (aspek fisik, kependudukan, sarana dan prsarana), Tinjauan Umum Kelurahan Buloa (tinjauan aspek lokasi kawasan kumuh, tinjauan kependudukan, tinjauan kondisi bangunan, tinjauan kondisi prasarana, dan aspek sosial ekonomi masyarakat), serta karakteristik responde.
- Bab IV : Analisis Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Kumuh**, menguraikan bahasan terhadap

ketersediaan prasarana dan manfaatnya, yang secara rinci memuat tentang; Analisis Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Buloa, Manfaat Prasarana Lingkungan Permukiman terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Bab V : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan penelitian dan saran – saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Permukiman

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang). Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus Tata Ruang).

Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang (Hamid, 1981).

Kumuh atau *slum* adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang

mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim.

Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman : Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Dengan melihat beberapa teori tersebut di atas maka pengertian permukiman kumuh adalah suatu kawasan permukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman tanpa sanitasi, dimana utilitas permukiman tanpa pengelolaan yang

baik, dan dengan tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi dan bersifat kotemporer atau darurat. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan rendah yang berdampak pada pola pikir yang cenderung statis ditambah lagi keadaan ekonomi di bawah rata-rata.

Untuk itu kajian penanganan permasalahan kumuh tersebut harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam rangka membangun kualitas hunian layak dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu upaya yaitu melakukan studi indentifikasi untuk mendapatkan informasi tingkat kekumuhan dalam rangka merumuskan strategi kebijakan, seperti kajian dalam penelitian ini dengan studi pada kawasan kumuh daerah pusat kota dan pada kawasan kumh daerah pesisir dimana telah tergolong sebagai lingkungan permukiman kumuh.



B. Terjadinya Permukiman Kumuh

Lewis (1984) dalam buku "kemiskinan di kota" mengutarakan bahwa kebanyakan penduduk berimigran dari desa ke kota menjadi kaum gelandangan yang disebutnya sebagai kaum miskin kota atau kaum kumuh, mereka ini biasanya bergerombol pada suatu komunitas yang kadang-kadang membentuk secara temporer perkumpulan-perkumpulan yang menempati wilayah tertentu.

Soemadi (1990) mengemukakan bahwa terjadinya permukiman kumuh karena besarnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Wilayah kumuh atau biasa disebut sebagai permukiman disebabkan karena terganggunya letak keseimbangan ekosistem karena sudah

berubahnya perbandingan kemampuan daya dukung lahan dan jumlah manusia.

Danoedjo (1990) mengemukakan bahwa terjadinya permukiman kumuh akibat penghasilan rata-rata penduduknya yang heterogen tumbuh dan memiliki keunikan tersebut dapat merupakan suatu gabungan antara fenomena fisik, social dan ekonomi yang timbul dan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu kota.

Pada wilayah penelitian dari hasil observasi diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab munculnya lingkungan permukiman kumuh yaitu ketidakmampuan ekonomi dalam membangun suatu kualitas hunian yang layak sehingga mereka cenderung memilih lokasi-lokasi yang umumnya berada dekat dengan pantai pada kawasan pesisir dan disekitar kanal pada wilayah pusat kota. Disamping itu faktor dominan penyebab kekumuhan adalah tingkat pendidikan yang tergolong rendah dimana hal ini berdampak pada perolehan lapangan kerja dan pola pikir untuk menumbuhkan kemandirian. Sementara itu desakan penggunaan lahan didaerah Kota Makassar untuk berbagai pembangunan sosial, ekonomi menyebabkan lahan yang ada di pusat kota memiliki nilai yang cukup tinggi begitupula sebaliknya pada kawasan pesisir peningkatan aktivitas industri dan perdagangan membutuhkan lahan yang cukup besar pula sebagai akibat dari desakan tersebut munculnya kecenderungan pemanfaatan

daerah sempadan sungai ataupun daerah sempadan pantai yang merupakan tanah negara.

C. Pembinaan Permukiman

Istilah perumahan dan permukiman itu sering kali diidentikkan meskipun sebenarnya tidak sama. Pengertian Perumahan (*housing*) menurut SNI 03-6891-2004 adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Permukiman (menurut Adisasmita, 2005) adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja (terbatas) untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Keterbelakangan pembangunan permukiman di kota-kota mengakibatkan keadaan perumahan yang tidak sehat, kekurangan penyediaan air bersih yang cukup, pelayanan kesehatan yang kurang, pengelolaan sampah kota yang tidak terkendali, dan akhirnya tumbuhnya daerah-daerah perumahan kurang sehat di kota-kota besar yang menimbulkan masalah-masalah sosial yang makin lama makin gawat.

Pembinaan permukiman di daerah perkotaan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan utama, sebagai berikut :

1. Usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pelayanan umum perkotaan.
2. Usaha perbaikan perumahan di daerah perkotaan melalui program perbaikan kampung dan pembangunan rumah susun.
3. Usaha pengaturan jaringan pengangkutan umum yang lebih lancar untuk mengimbangi peningkatan kendaraan bermotor dan makin padatnya lalu lintas perkotaan.
4. Usaha pencegahan pencemaran lingkungan udara dan air yang diakibatkan oleh buangan rumah tangga, pasar dan industri.
5. Usaha pengaturan tata ruang dan tata guna tanah perkotaan yang lebih serasi sehingga segala fungsi kota mendapatkan tempat dan berfungsi secara layak dalam kesesuaian satu sama lain.
6. Usaha pembinaan kesadaran masyarakat perkotaan akan pentingnya pengikutsertaan yang aktif dalam pembinaan lingkungan permukiman yang lebih baik, peningkatan disiplin menuju ketertiban dan ketentraman kehidupan perkotaan yang lebih sejahtera.

Pendekatan dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman di daerah perkotaan, sebagai berikut :

1. Desentralisasi penyediaan prasarana dan sarana permukiman kepada sumber-sumber pemerintah daerah.
2. Partisipasi masyarakat melalui prinsip *cost recovery* (dengan retribusi atau pajak) baik langsung maupun tidak langsung dari setiap investasi prasarana dan sarana permukiman.

3. Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana yang menguntungkan (perumahan, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan).

D. Konsep Lingkungan Permukiman yang Ideal

Menurut Sinulingga, B. (1999) permukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu pertama ialah lahan atau tanah yang diperuntukkan untuk permukiman itu dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun atas lahan itu. Misalnya apabila tanah yang sangat lembek atau merupakan lembah akan memerlukan pekerjaan perbaikan tanah atau konstruksi pondasi yang mahal. Yang kedua ialah prasarana permukiman yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air kotor, saluran air bersih serta jaringan listrik dan telepon yang semuanya juga turut menentukan kualitas permukiman yang dibangun. Komponen yang ketiga yaitu perumahan yang dibangun, dan suatu permukiman akan menjadi ideal apabila telah memiliki komponen yang keempat yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lapangan bermain dalam lingkungan permukiman itu.

Dalam membangun atau menata kawasan permukiman harus diperhatikan ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman, dan kualitas lingkungan permukiman dapat mempengaruhi status dan

derajat kesehatan manusia. Menurut Maslow (1987; dalam Darmawan, 2003) bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu *terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi:
 - a. Udara segar dan lingkungan yang hijau
 - b. Air bersih (minum, mandi, cuci, dll)
 - c. Makanan yang sehat dan pakaian yang layak
 - d. Tempat tinggal yang memadai.
2. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan dimana manusia terbebas dari rasa takut, yang meliputi:
 - a. Perlindungan dari bencana alam dan kriminalitas.
 - b. Perlindungan dari kemiskinan, kelaparan, dan penyakit.
 - c. Struktur Kelembagaan, hukum, pemerintahan dan adat istiadat.
3. Kebutuhan interaksi sosial, yaitu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat atau berkelompok, meliputi:
 - a. Rasa setia kawan, dicintai dan disenangi di dalam kelompok.
 - b. Mau bekerja sama dalam hal positif.
4. Kebutuhan penghargaan dan pengakuan diri, meliputi:
 - a. Penghargaan dari orang lain
 - b. Memperoleh keadilan dan kebebasan
 - c. Mendapatkan kepercayaan diri
 - d. Prestise.



5. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**, yaitu harapan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan potensi tanpa mengganggu orang lain, serta memberikan kebaikan kepada orang lain.

Menurut Sujarto (1993), permukiman sebagai salah satu fungsi kawasan memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu: tempat tinggal (*place*), tempat kerja (*work*), dan tempat bermasyarakat (*folk*). Sujarto juga menjelaskan bahwa Permukiman Manusia merupakan suatu totalitas lingkungan yang terbentuk oleh unsur-unsur yang eksistiks yang terdiri dari 'Alam' (*nature*) yaitu bahwa permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya (geografis, topografi, geologi, iklim, flora dan fauna).

Menurut Blum (dalam Budiharjo,1998) faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan manusia adalah lingkungan, kemudian baru diikuti oleh faktor lainnya seperti perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Menurut Tidler R. (dalam Budiharjo,1998) mengatakan bahwa peningkatan sanitasi lingkungan, gizi, dan pendidikan mempunyai peranan yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan dalam hubungannya dengan status kesehatan masyarakat khususnya harapan hidup (*Life Expectancy*).

Dalam UU No. 4 tahun 1992 yang terdiri dari 28 pasal dan 89 ayat tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa selain

untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar melalui penataan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur, pengembangan perumahan dan permukiman juga mempunyai tujuan lain, yaitu untuk memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain.

Berdasarkan UU No. 4 tersebut, terdapat beberapa hal yang penting berkenaan dengan pengadaan perumahan di Indonesia, yaitu :

1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati/menikmati/ memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
2. Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana, menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan secara bertahap.
3. Pemerintah melakukan pembinaan dibidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan bimbingan, pemberian bantuan, kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Berbagai fakta menunjukkan banyaknya permukiman yang dibangun tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai wadah kelengkapan, walaupun ada kualitasnya sangat rendah atau

tidak berfungsi dengan baik. Menurut Sinulingga (1999), permukiman yang baik harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.
3. Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun terjadi hujan yang lebat sekalipun.
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
5. Dilengkapi dengan fasilitas buangan air kotor yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu septik tank dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik tank komunal.
6. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
7. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

E. Prasarana Lingkungan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat, belum dapat memenuhi dan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat di perkotaan. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa pembangunan perumahan di kota semakin tertinggal dari laju pertumbuhan jumlah penduduk (Siswono, 1991). Jumlah penduduk yang memadati kota akan berdampak pada penyediaan permukiman dan berbagai prasarana lingkungan di daerah perkotaan. Hal ini karena prasarana perkotaan merupakan syarat utama suatu kota dapat melakukan peranannya sebagai tulang punggung perekonomian negara, keberadaannya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan penduduk.

Untuk menciptakan suatu lingkungan permukiman yang baik maka diperlukan prasarana permukiman dan sarana umum permukiman. Adapun yang dimaksud dengan prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri disebutkan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah :

1. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
2. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan.
3. Jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, maka jaringan air bersih merupakan prasarana dasar. Beberapa standar yang dapat digunakan untuk menjelaskan prasarana lingkungan permukiman meliputi : Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 43/ KPTS/ CK/ 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan (PU Cipta Karya,1999), Standar Pelayanan Minimal Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, 2000). Sedangkan, standar yang dapat digunakan untuk menjelaskan prasarana

Lingkungan permukiman adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ KPTS/ 1986 Tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun dan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-6981-2004) tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan, yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Adapun prasarana lingkungan permukiman meliputi :

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan adalah jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang. Dalam hal ini dibedakan menjadi:

a. Jalan Lingkungan atau jalan kendaraan, yaitu jalan yang menghubungkan dari suatu kelompok rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke fasilitas lingkungan atau menuju tempat bekerja. Standar minimal jalan lingkungan atau kendaraan dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Jalan Satu arah.

Lebar perkerasan minimal 3 m, lebar bahu jalan 0,5 m, lebar trotoar 1,5 m, lebar saluran drainase 0,5 m, dan lebar sempadan bangunan 7m.

2) Jalan Dua Arah.

Lebar perkerasan minimal 4 m, lebar bahu jalan 1,5 m, lebar trotoar 1 m, lebar drainase 0,5 m, dan lebar sempadan bangunan 10 m.

b. Jalan setapak, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua yang menghubungkan antar rumah di dalam kelompok perumahan penduduk. Standar minimal untuk jalan setapak adalah: lebar 1,2 m, lebar bahu jalan 0,5 m, lebar saluran drainase 0,5 m, dan lebar sempadan bangunan 4 m. Untuk bahu jalan dan drainase dapat dibangun pada dua sisi jalan atau pada satu sisi saja.

Standar Pelayanan Minimal bidang permukiman terhadap panjang jalan adalah:

- 1) Jalan Lingkungan. Panjang jalan : 40 -60 m/Ha.
- 2) Jalan Setapak. Panjang jalan : 50 – 110 m/Ha.

Klasifikasi jalan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1.

Persyaratan klasifikasi jalan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-6981-2004).

No.	Klasifikasi jalan lokal	Lebar badan jalan minimum (m)	Lebar perkerasan jalan minimum (m)	Lebar bahu jalan minimum (m)	Sempadan bangunan minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat	
					Rumah bertantai 2	Rumah bertantai 1
1	Jalan lokal sekunder	2.00	1.20	0.25	2.75	1.75
	- jalan setapak					
2	Jalan lokal sekunder II	3.50	3.00	0.50	2.75	1.75
	- jalan kendaraan					
3	Jalan kolektor sekunder	5.00	4.50	0.50	3.50	2.50
		7.00	5.00	0.50	4.50	3.50

Catatan:

- 1) Konstruksi jalan sesuai dengan ketentuan kelas jalan.
- 2) Radius belokan dan kemiringan jalan bagi setiap jenis jalan harus mengikuti ketentuan geometri jalan yang berlaku.
- 3) Berfungsi juga sebagai jalan untuk kendaraan yang dipertukan dalam keadaan darurat, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulance.
- 4) Mempunyai daerah manfaat jalan dengan lebar penampang sebesar-besarnya 6 meter, dan mempunyai lebar perkerasan jalan sekurang-kurangnya 3 meter.

2. Drainase

Drainase berfungsi untuk menyalurkan air hujan, agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Seringkali saluran ini dapat pula dimanfaatkan untuk pembuangan air limbah rumah tangga. Dalam pembuatan saluran drainase beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Saluran drainase ini harus disesuaikan dengan sistem drainase yang lebih besar misalnya saluran sekunder.
- b. Saluran drainase ini harus disesuaikan dengan sistem drainase yang lebih besar misalnya saluran sekunder.
- c. Saluran ini dibangun pada kiri kanan jaringan jalan.

Menurut Sinulingga (1999), saluran lokal yaitu saluran yang melayani permukiman pada tiap persil demi persil yang dapat berbentuk saluran terbuka atau tertutup. Untuk merencanakan dimensi masing-masing sistem diperlukan debit rencana banjir yang akan terjadi, yang besarnya tergantung kepada curah hujan yang terjadi, karakteristik daerah aliran dan koefisien aliran permukaan.

Untuk saluran lokal persyaratan spesifikasi teknis saluran terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut (Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, 2001 : L2 - 4 dan Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun (1986) :

a. Persyaratan saluran terbuka, meliputi :

- 1) Lebar saluran 0,3 - 1 m
- 2) Saluran berbentuk 1/2 lingkaran, diameter minimum 20 cm.
- 3) Kemiringan saluran 3% atau minimum 2% atau yang dapat mengalirkan air dengan kecepatan 0,3 - 0,6 m/detik.
- 4) Kedalaman saluran minimum 40 cm.
- 5) Dasar saluran beton/batu kali/buis beton.

b. Persyaratan saluran tertutup:

- 1) Saluran dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak 10 m dan pada setiap belokan.
- 2) Kemiringan saluran minimum 2%
- 3) Kedalaman saluran minimum 30 cm.
- 4) Bahan bangunan PVC, beton.

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana (1991:8) disebutkan juga ukuran saluran pembuangan sekurang-kurangnya:

- c. Lebar atas 30 cm
- d. Lebar bawah 20 cm
- e. Tinggi 30 cm.

Dalam buku SPM disebutkan standar pelayanan minimal panjang saluran air hujan adalah 120-250 m/ha. Saluran drainase dari lingkungan perumahan dialirkan ke saluran penampung yang lebih besar kapasitasnya dan selanjutnya dialirkan ke sungai,

danau, kolam, atau laut. Jika melihat hal tersebut maka akan terkait dengan sistem drainase yang lebih kompleks yaitu sistem drainase kota.

F. Permukiman Kumuh

Proses perkotaan atau urbanisasi adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara yang sudah maju, demikian pula oleh negara-negara yang sedang membangun. Proses perkotaan di negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat, karena daya penarik kota sangat kuat baik bersifat ekonomis maupun bersifat non ekonomis. Keadaan di daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan keterdesakan akan tempat tinggal bagi kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah-daerah pinggiran (*slum area*), hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Kumuh atau *slum*, adalah permukiman orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan (*semrawut*) oleh Parsudi

Suparlan (dalam Adisasmita, 2005). Menurut Adisasmita (2005) permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim.

Kebanyakan penduduk bermigrasi dari desa ke kota menjadi kaum gelandangan yang disebutnya sebagai kaum miskin kota atau kaum kumuh. Mereka ini biasanya bergerombol pada suatu komunitas yang kadang-kadang membentuk secara temporer perkumpulan-perkumpulan yang menempati wilayah tertentu. Taylor (1972 : 13) menggambarkan lingkungan yang kumuh yang banyak tersebar di seluruh kota dengan keadaan yang saling berbeda di dalam kota yang sama. Akan tetapi sering lokasi tempat-tempat tersebut adalah "Halaman Belakang" dari kota. Seiring dengan kondisi lingkungan yang secara ekologi jorok dan kumuh, melekat pula ciri kehidupan sosial masyarakat yang penghuninya dalam situasi yang bertaraf rendah.

Lingkungan kumuh yang banyak dijumpai dalam kota mempengaruhi perkembangan mental penduduk yang menjurus pada sikap frustrasi, apatis dan sikap pasrah pada lingkungannya. Istilah permukiman kumuh (slum area) mengandung pengertian-pengertian pokok yang digunakan di dalam beberapa definisi yakni apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, kurang, tidak berencana, bobrok, berbahaya, tidak aman, tua, kotor, di bawah standar, kurang mendapat perhatian dan tidak sehat.

c. Dari Segi Hukum

Sebagian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada, hal ini disebabkan karena langka dan mahal nya tanah di perkotaan.

d. Dari Segi Ekonomi

Terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen, produktivitas kesehatan lingkungan rata-rata rendah, sektor perekonomian bersifat informal seperti : penarik becak, buruh, pedagang kaki lima. Tingkat keinginan menabung penduduk umumnya rendah karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perkampungan kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunan- bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dan fasilitas tempat pembuangan sampah namun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kebersihan.

G. Kategori Permukiman Kumuh

Menurut Komarudin (1997:83) lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan yang hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun

di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan bahwa lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni adalah suatu lingkungan permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan permukiman tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.

Menurut Koestoer (2001), menyebutkan karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah sehingga terlihat jorok dan kotor.

Kawasan kumuh dapat dibedakan atas. (Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001) :

1. Kawasan kumuh di atas tanah legal (*slums*), adalah permukiman kumuh dengan segala ciri seperti tersebut di atas yang berlokasi di atas lahan yang peruntukannya memang perumahan.
2. Kawasan kumuh di atas tanah tidak legal (*squatters*), yaitu kawasan permukiman kumuh yang berada pada peruntukan yang bukan

perumahan dalam RUTR, baik milik negara maupun milik perorangan atau Badan Hukum, yang dihuni secara tidak sah.

Berdasarkan kategori permukiman kumuh yang ada seperti uraian di atas, maka kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Buloa sebahagian menempati tanah legal (slums) dan sebahagian lainnya menempati tanah illegal (squatters). Sedangkan permukiman kumuh yang terdapat di Buloa yang merupakan permukiman kumuh disekitar pesisir yang sebahagian besar wilayahnya menempati tanah dengan status tidak legal (squatters).

H. Karakteristik Permukiman Kumuh

Di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia memang banyak terdapat kantong-kantong permukiman kumuh. Karakteristik permukiman kumuh (Laporan Hasil Lokakarya Aplikasi Teknologi Tepat Guna dan Peran Serta Masyarakat Dalam Sektor Perumahan dan Permukiman di Daerah Kumuh Perkotaan dan Perdesaan, hal. 9-10, dalam buku Laporan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penyuluhan Bidang PLP untuk Permukiman Kumuh tahun 1993), dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk tinggi (250 - 500 orang/Ha)
2. Pendapatan sebagian besar penduduk lebih rendah dibanding pendapatan rata-rata perkotaan

3. Sektor pendapatan dan pencaharian sebagian besar bersifat informal
4. Tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai (air bersih, PLP, jalan, akses, dan sebagainya)
5. Pertambahan penduduk tinggi (2 - 5%)
6. Struktur masyarakat sangat heterogen
7. Mobilitas dan perubahan struktur cepat berlangsung
8. Umumnya status daerah permukiman kumuh masih dipertanyakan, mungkin pula merupakan daerah yang illegal.

Secara garis besar, pola penanganan lingkungan kumuh sangat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk yang ada, yang uraiannya sebagai berikut:

1. Bila kondisi lingkungan sangat padat (> 500 orang/Ha), dimana rumah dan prasarana tidak mungkin diperbaiki, maka harus dilakukan peremajaan (pembangunan rumah susun).
2. Bila kondisi lingkungan padat (≥ 500 orang/Ha), maka yang ditangani adalah perbaikan kampung dan prasarana dasar lingkungan.
3. Bila ternyata tata letak rumah mengganggu jalur pengaman atau pelebaran jalan, harus dilakukan pembongkaran rumah-rumah tersebut.

Sesuai dengan uraian tentang pola penanganan lingkungan kumuh berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, maka kepadatan

penduduk yang ada di lokasi penelitian masih tergolong ke dalam kondisi lingkungan padat (≥ 500 orang/Ha), sehingga diperlukan upaya perbaikan kampung dan prasarana dasar lingkungan.

I. Bentuk-Bentuk Permukiman Kumuh

Menurut Johan Silas (1992), ada 3 bentuk dasar dari pemukiman kumuh :

1. Oportunis

Bentuk permukiman ini memang dimaksudkan untuk mendapatkan peluang memperoleh ganti rugi (uang) bila digusur oleh pemerintah atau oleh pemilik tanah yang ditempati oleh penghuni liar. Banyak penduduk dari desa yang berurbanisasi ke kota menjual rumah, sawah atau ternak mereka untuk membeli rumah di tempat kumuh yang sangat murah tetapi rawan digusur.

2. Mempunyai Tujuan

Bentuk ini lebih umum dan tersebar jumlahnya, yaitu untuk menetap. Bentuk ini ada yang berawal seperti bentuk Oportunis, sambil mendemonstrasikan kemampuan mereka membuat rumah sendiri, tanpa bantuan apapun dan dari siapapun, namun mereka tak mampu mengadakan tempat yang layak dan benar.

Bank Dunia (*World Bank*) yang bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan sarana dalam wilayah kecamatan.

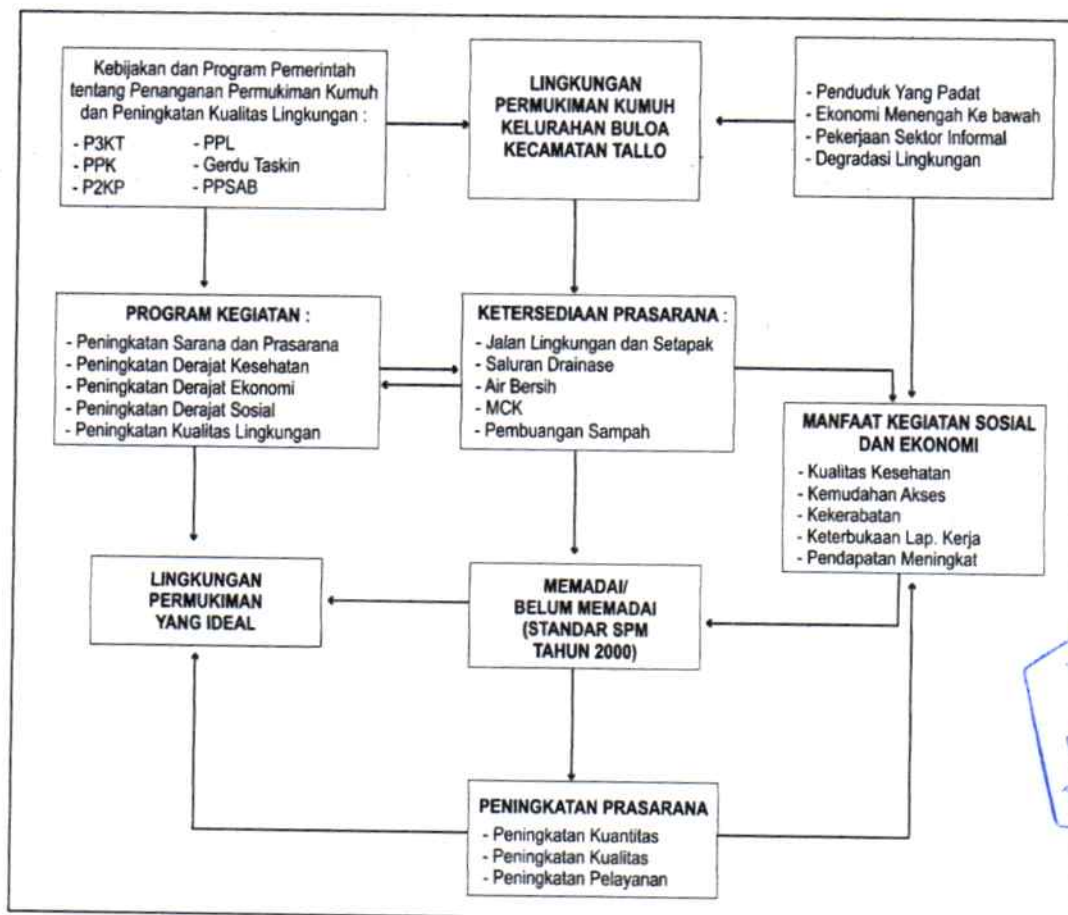
2. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau Urban *Poverty Project* (UPP) yang juga memperoleh dukungan dana dari Bank Dunia untuk pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan telah dilaksanakan.
3. Program Pemberdayaan Lingkungan (PPL) yang dilakukan setiap tahun untuk memperbaiki prasarana dan sarana lingkungan perkotaan dan perdesaan yang memperoleh dukungan dana dari APBD Kota Makassar.
4. Program Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan yang memperoleh dukungan dana dari APBN, APBD propinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kota Makassar.
5. Program penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (*Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/ WSLIC*) yang memperoleh dana dari Bank Dunia.
6. Program Pemugaran dan Rehabilitasi Perumahan dan Permukiman yang memperoleh dukungan dana dari APBD propinsi dan APBD Kota Makassar yang dilaksanakan pada beberapa wilayah perkotaan dan perdesaan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin

7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang memperoleh dukungan dari APBN dan Bantuan Luar Negeri BLN).
8. Program Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) yang memperoleh dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat

Program dan kegiatan tersebut telah mampu memperbaiki permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, namun masih terdapat banyak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun kebijakan pemerintah Kota Makassar saat ini adalah senantiasa meningkatkan jenis kegiatan dan pendanaan dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Program dan kegiatan di atas yang telah terlaksana di kedua kelurahan objek penelitian yaitu untuk kelurahan Buloa telah dibangun tangki hidran umum (HU) bagi penduduk yang bermukim di RW I melalui Program Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) tahun 2002, sedangkan di Kelurahan Buloa telah dilaksanakan proyek peningkatan kualitas jalan setapak dan jalan lingkungan yang terdapat di RW VI, VII dan VIII melalui Program Pemberdayaan Lingkungan (PPL) selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2001-2002.

K. Kerangka Pemikiran



b. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Jenis tanah di Kecamatan Tallo umumnya sama dengan jenis tanah yang ada di beberapa kecamatan lainnya, yang meliputi; Aluvial Hidromoft, Aluvial Kelabu, Aluvial Cokelat, Gleihumus Rendah dan Regosol Coklat Kekuningan. Kondisi jenis tanah tersebut merupakan lahan yang dapat ditanami jenis komoditas tertentu dan memerlukan perlakuan khusus.

c. Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim dan curah hujan di Kecamatan Tallo pada umumnya sama dengan Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Makassar, selain merupakan wilayah yang beriklim tropis. Kelurahan Tallo juga memiliki suhu udara rata-rata pada siang hari 32^oC dengan suhu maksimum 34^oC, sedangkan suhu udara rata-rata pada malam hari 26^oC dengan suhu maksimum 23^oC dengan kelembaban rata-rata 80 %. Sedangkan curah hujannya dipengaruhi oleh kondisi dari angin laut yaitu ± 2.000 Mm.

d. Kondisi Hidrologi

Sumberdaya air yang digunakan penduduk Kecamatan Tallo bersumber dari PDAM, air tanah dangkal dan dalam dengan memanfaatkan sumur gali dan sumur pompa (artesis).

e. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Tallo mengalami perubahan setiap tahun, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan dan

pertumbuhan penduduk yang mendiami kawasan. Pemanfaatan lahan di Kecamatan Tallo terdiri dari; sawah, tambak, perumahan dan permukiman, fasilitas sosial ekonomi serta bangunan lainnya.

3. Aspek Kependudukan

Keadaan demografi dan kependudukan hingga akhir tahun 2008 di Kecamatan Tallo menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kecamatan Tallo saat ini dihuni penduduk kurang lebih 128.141 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi demografi dan kependudukan Kecamatan Tallo dijelaskan pada kajian berikut.

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata jumlah penduduk Kecamatan Tallo selama lima tahun terakhir dirinci berdasarkan kelurahan memperlihatkan pertumbuhan sebesar 10,92%. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Pertumbuhan penduduk dirinci menurut kelurahan di Kecamatan Tallo pada tabel 2

Tabel 2.
Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Tallo
Dirinci per Kelurahan Tahun 2004-2008

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jlwa)	
		2003	2007
1	Bunga Eja Beru	8.432	9.366
2	Lembo	10.932	10.942
3	Kalukuang	4.234	5.093
4	La'latang	4.326	5.308
5	Rappo Jawa	6.752	7.575
6	Tammua	8.736	8.752
7	Rappokalling	12.982	13.835
8	Wala-Walaya	7.947	8.911
9	Ujung Pandang Baru	5.327	4.527
10	Suangga	8.632	8.647
11	Pannampu	14.914	14.919
12	Kalukubodoa	14.853	15.818
13	Buloa	7.623	6.675
14	Tallo	7.427	7.479
15	Lakkang	834	946
Jumlah		115.527	128.141
Pertumbuhan (%)		10,82	

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

4. Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi

Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk terciptanya sistem kegiatan perdagangan sebagai media sirkulasi aliran barang dan jasa sesuai fungsi pengelolaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi hasil-hasil produksi masyarakat serta memperluas jaringan pemasaran. Sistem perdagangan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem komunikasi dan transportasi dengan mengatur tata niaga untuk menjaga persaingan tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk menentukan arahan pengembangan Kecamatan Tallo tidak hanya ditinjau dari aspek fisik saja, juga mempertimbangkan

aspek ekonomi, sosial dan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kegiatan sektor ekonomi yang dominan, pola dan sistem distribusi kegiatan sektor ekonomi serta kecenderungan perkembangan sektor ekonomi. Sehingga dapat memudahkan dalam menentukan sektor-sektor kegiatan yang dapat dikembangkan.

a. Fasilitas Perumahan

Karakteristik perumahan di Kecamatan Tallo meliputi; rumah permanen dan semi permanen. Fasilitas perumahan merupakan sarana pokok dalam membina keluarga, tempat hidup dan aktivitas keseharian penduduk. Jumlah dan banyaknya rumah berdasarkan kelurahan di sajikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Jumlah Fasilitas Perumahan di Kecamatan Tallo
di Menurut Jumlah Kelurahan

No	Kelurahan	Rumah Tangga	Jumlah Rumah (Unit)	Persentase (%)
1	Bunga Eja Beru	2.552	1.873	7,31
2	Lembo	2.885	2.098	8,19
3	Kalukuang	1.297	1.019	3,98
4	La'latang	1.035	1.061	4,14
5	Rappo Jawa	1.824	1.515	5,91
6	Tammua	2.433	1.750	6,83
7	Rappokalling	3.744	2.727	10,64
8	Wala-Walaya	2.025	1.782	6,95
9	Ujung Pandang Baru	1.123	905	3,53
10	Suangga	2.431	1.729	6,75
11	Pannampu	4.512	2.984	11,64
12	Kalukubodoa	5.145	3.164	12,35
13	Buloa	1.932	1.335	5,21
14	Tallo	2.042	1.496	5,84
15	Lakkang	258	189	0,74
Total		35.237	25.627	100,00

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dan jenis fasilitas perumahan terbanyak terdapat di Kelurahan Kalukubodoa dengan jumlah 3.164 unit atau 12,35 %. Sedangkan jumlah fasilitas perumahan paling sedikit berada di Kelurahan Lakkang yaitu 189 unit atau 0,74 %.

b. Fasilitas Pendidikan

Pelayanan fasilitas pendidikan sangat menentukan mutu dan tingkat pendidikan masyarakat, oleh sebab itu memerlukan ketersediaan pelayanan yang tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga memperhatikan ketersediaan prasarana pendidikan, tenaga pengajar serta kurikulum pendidikan yang disajikan. Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Tallo

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	TK Negeri/Swasta	17	18,89
2	SDN/Swasta	51	56,67
3	SLTP/Swasta	13	14,44
4	SLTA/Swasta	7	7,78
5	PT	2	2,22
Jumlah		90	100,00

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

c. Fasilitas Kesehatan

Upaya untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan. Jumlah dan kualitas yang dimaksud

berkaitan dengan jumlah fasilitas, jangkauan, pelayanan, tenaga dan peralatan medis. Adapun jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia diuraikan pada table berikut :

Tabel 5.
Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tallo

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Rumah Sakit Umum/Khusus	1	4,35
2	Puskesmas	2	8,70
3	Praktek Bidan	4	17,39
4	Apotek	7	30,43
5	Toko Obat	9	39,13
Jumlah		23	100,00

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

d. Fasilitas Peribadatan

Sikap dan perilaku manusia dalam melaksanakan kehidupannya pada dasarnya dilandasi dengan keyakinan dan agama yang dianut serta menjadi pedoman yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Data tahun 2008 tercatat jumlah penduduk yang menganut agama islam di Kecamatan Tallo sebanyak 105.103 jiwa atau 82,02 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.
Struktur Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Tallo

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	105.103	82,02
2	Kristen Katolik	7.851	6,13
3	Kristen Protestan	10.088	7,87
4	Hindu	176	0,14
5	Budha	4.244	3,31
6	Konghucu	58	0,05
7	Lainnya	621	0,48
Jumlah		128.141	100,00

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sub sektor perdagangan dan jasa mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Tallo. Keberadaan sektor perdagangan dan jasa memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi di dalam suatu wilayah, oleh karena itu peningkatan kegiatan ekonomi perlu ditingkatkan. Keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Tallo saat ini meliputi; pasar, supermarket/pasar swalayan, restoran/rumah makan, toko/warung/kios, kelompok pertokoan, dan bank pemerintah/swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.

Banyaknya Fasilitas Perdagangan dan Jasa Di Kecamatan Tallo

No	Jenis Fasilitas (unit)	Jumlah Fasilitas (Unit)	Persentase (%)
1	Pasar	5	1,13
2	Supermarket/Pasar Swalayan	2	0,45
3	Restoran/Rumah Makan	3	0,68
4	Toko/Warung/Kios	427	96,38
5	Kelompok Pertokoan	3	0,68
6	Kantor Pegadaian	-	-
7	Bank Pemerintah/Swasta	3	0,68
Jumlah		443	100,00

Sumber : Kecamatan Tallo Dalam Angka, 2008

Tabel diatas, menjelaskan bahwa keberadaan sub sektor perdagangan yang dominan adalah ketersediaan fasilitas toko/warung/kios, jumlah fasilitas terbesar diantara beberapa jenis fasilitas yang ada, yaitu; 427 unit atau 96,38 %. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sebahagian masyarakat

Kecamatan Tallo dalam arti luas lebih berorientasi ekonomi yakni membuka usaha toko/warung/kios.

f. Fasilitas Industri

Kegiatan industri yang ada di Kecamatan Tallo merupakan kategori industri sedang dan kecil atau industri rumah tangga. Kegiatan pada sub sektor industri tidak terpusat pada kawasan melainkan menyebar di permukiman penduduk. Hasil pengamatan yang dilakukan, jenis kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah : jenis industri kerajinan kayu/bambu/rotan, kerajinan dari kain/tenun dan makanan. Hasil dari industri tersebut tidak diperoleh besaran dan jumlah produksi yang dihasilkan.

5. Kondisi Prasarana

Aspek prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu kawasan. Prasarana yang dimaksud meliputi: prasarana jalan, jaringan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telepon dipergunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas atau kegiatan dalam rangka peningkatan pertumbuhan suatu wilayah.

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, disamping fungsi tersebut jaringan jalan dapat digunakan sebagai transformasi aliran barang dan penumpang

yang mempunyai komposisi sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan. Dengan demikian kondisi tersebut memerlukan pemikiran dengan penataan jaringan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi setiap jalan.

Hubungan utama antar kawasan internal dan eksternal Kecamatan Tallo dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dengan dukungan ketersediaan jaringan jalan. Ketersediaan sistem jaringan jalan menurut jenis permukaan di Kecamatan Tallo dikategorikan sebagai berikut : aspal/beton, pengerasan dan jalan tanah. Kondisi jaringan jalan menurut jenis permukaan di Kecamatan Tallo untuk masing-masing kelurahan umumnya dalam kondisi aspal/hotmix dan sebahagian lokasi menggunakan jalan paving blok.

b. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang penerangan rumah tangga, kegiatan industri dan kegiatan lainnya, oleh karena itu listrik memegang peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan penerangan. Pemenuhan kebutuhan akan jaringan listrik untuk Kecamatan Tallo dewasa ini sudah terlayani untuk keseluruhan wilayah/kawasan.

c. Jaringan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, oleh karena itu air bersih yang dijadikan sebagai sumber kebutuhan utama harus bebas dari rasa, bau dan tidak berwarna. Sumber air bersih yang digunakan masyarakat Kecamatan Tallo bersumber dari PDAM, air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (artesis). Dari hasil survey lapangan, kondisi air bersih yang ada sampai saat ini masih aman untuk dikonsumsi dan belum mengalami pencemaran, baik yang disebabkan oleh kegiatan industri rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan air.

d. Jaringan Telepon

Salah satu prasarana yang efisien dan cepat untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi adalah penyediaan prasarana jaringan telepon. Penggunaan jaringan telepon sangat penting dalam penerimaan informasi baik untuk kegiatan bisnis dan proses yang dilakukan masyarakat untuk berinteraksi. Ketersediaan prasarana telepon yang ada saat ini berupa telepon rumah tangga, warung telekomunikasi (wartel) dan penggunaan telepon seluler.

e. Jaringan Drainase

Fungsi jaringan drainase digunakan sebagai sarana untuk mengalirkan air buangan baik yang bersumber dari air hujan, air

buangan rumah tangga dan air yang bersumber dari jalan. Jaringan drainase di Kecamatan Tallo terdiri dari drainase sekunder dan tersier dengan kondisi permanen dan temporer (tanah). Untuk panjang dan lebar keseluruhan drainase tidak diperoleh data.

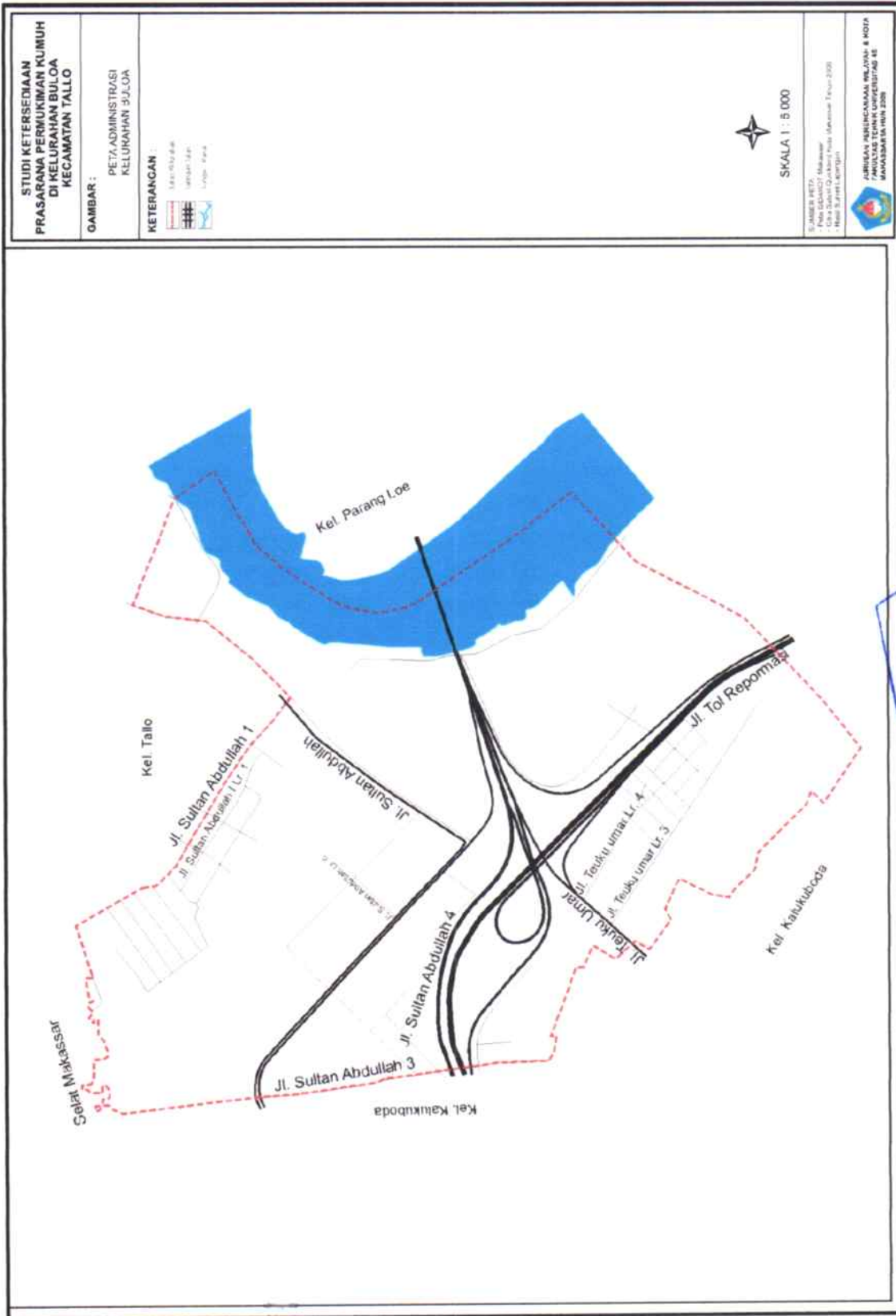
f. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan sumber bibit penyakit yang memerlukan penanganan. Kondisi sistem pelayanan persampahan di Kecamatan Tallo ditunjang dengan penyediaan tempat pembuangan sementara maupun pembuangan akhir, sehingga umumnya pola pengolahan sampah saat ini menggunakan sistem pewadahan dengan tersedianya *countainer* dan armada pengangkutan serta sebahagian kecil masyarakat mengolah sampah yang dihasilkan dengan jalan ditanam dan dibakar (sistem konvensional).

B. Tinjauan Umum Kelurahan Buloa

1. Letak Geografis

Kelurahan Buloa memiliki luas wilayah 61 ha yang meliputi 25 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW). Secara administratif, Kelurahan Buloa berbatasan dengan :



Gambar 3. Peta Administrasi Kelurahan Buloa

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tallo dan Selat Makassar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parang Loe
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa

2. Tinjauan Aspek Lokasi Kawasan Kumuh

Penilaian tingkat kekumuhan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh didasarkan pada indikator : legalitas tanah, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana kebakaran, banjir dan tanah longsor.

a. Legalitas Tanah

Status kepemilikan tanah pada kawasan pemukiman dan perumahan kumuh di lokasi sasaran Kelurahan Buloa secara umum berstatus hak milik, hak pakai dan hak sewa.

b. Status Penguasaan Bangunan

Status penguasaan bangunan adalah status kepemilikan dan penggunaan bangunan. Semakin banyak penduduk disuatu lingkungan pemukiman yang menguasai bangunan bukan milik sendiri, yaitu dengan cara sewa/kontrak, mengindikasikan tingkat permasalahan kumuh dari segi penguasaan bangunan rumah sangat tinggi.

c. Frekuensi Bencana

Frekwensi bencana adalah banyaknya kejadian bencana pada suatu lingkungan permukiman. Frekwensi bencana yang dimaksud adalah banjir, kebakaran dan tanah longsor, hal tersebut biasanya disebabkan tidak tersedianya atau kurang terpeliharanya prasarana drainase ataupun tempat pembuangan akhir, sarana dan prasarana buruk serta semakin tinggi tingkat kerawanan bagi kelangsungan hidup penduduknya. Semakin sering terjadinya bencana maka permukiman tersebut diindikasikan sebagai kawasan kumuh dan rawan terhadap penyakit.

3. Tinjauan Kependudukan

a. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin besar tekanan terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana. Teknik penilaiannya adalah membandingkan banyaknya penduduk dengan luas wilayah administrasi kelurahan (Ha).

Tabel 8.

Tingkat Kepadatan Penduduk di Kelurahan Buloa

No	Variabel	Jumlah	Kepadatan	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Penduduk (ΣP)	6.675 (jiwa)	109	Tidak Kumuh (TK)	1
2	Luas Wilayah (W)	61 (Ha)			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

b. Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah tangga (*family size*) adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap kepala keluarga (KK). *Family size* ini menunjukkan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. Semakin besar rata-rata ukuran rumah tangga menunjukkan semakin besarnya tingkat konsumsi barang maupun jasa pada keluarga tersebut, misalnya konsumsi listrik dan air akan lebih besar pada keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih besar.

Anggota keluarga yang lebih besar tentunya akan membutuhkan luas lantai yang lebih besar. Rata-rata anggota rumah tangga dinilai dengan membandingkan jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah seluruh KK.

Tabel 9.

Rata-Rata Anggota Rumah Tangga di Kelurahan Buloa

No	Variabel	Jumlah (Jiwa)	$PK/\Sigma KK$	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Penduduk Keseluruhan (PK)	6.675	4	Tidak Kumuh (TK)	1
2	Jumlah KK Keseluruhan (ΣKK)	1.932			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

c. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Rumah

Jumlah KK per rumah adalah perbandingan antara jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi angka perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan semakin banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar. Teknik penilaiannya adalah membandingkan jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah rumah pada wilayah yang sama.

Tabel 10.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Rumah di Kelurahan Buloa

No	Variabel	Jumlah (KK)	Σ KK/B	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah KK Keseluruhan (Σ KK)	1.932	2	Kumuh Ringan (KR)	2
2	Jumlah Bangunan (B)	1.330			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

d. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada satu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 100 penduduk. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan prasarana dan sarana fisik lingkungan yang harus dipenuhi seiring berkembangnya waktu. Tingkat penilaiannya adalah membandingkan jumlah penambahan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan dengan 100.

Tabel 11.**Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Buloa**

No	Variabel	Jumlah (Jiwa)	PAk-PAw/PAw x 100 %	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Penduduk Akhir Tahun (PAk)	6.675	1	Kumuh Ringan (KR)	2
2	Jumlah Penduduk Awal Tahun (PAw)	6.633			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

e. Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada satu wilayah. Semakin tinggi angka kematian kasar, mengindikasikan rendahnya kualitas lingkungan yang berhubungan dengan masalah kesehatan suatu permukiman. Penilaiannya dengan membandingkan banyaknya jumlah kematian yang terjadi pada tahun tertentu dengan penduduk awal pertengahan tahun tersebut dikalikan 1000.

Tabel 12.**Angka Kematian Kasar di Kelurahan Buloa**

No	Variabel	Jumlah (Jiwa)	$I/Po \times 1.000$	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Kematian Dalam Setahun (I)	0	0	Tidak Kumuh (TK)	1
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Yang Sama (Po)	6.652			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

4. Tinjauan Terhadap Kondisi Bangunan**a. Tingkat Kualitas dan Kelayakan Bangunan**

Kualitas struktur bangunan yang dimaksud terkait dengan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan bangunan,

khususnya rumah tinggal. Tingkat kualitas keamanan dan keselamatan bangunan, khususnya bangunan rumah tidak memenuhi struktur bangunan adalah presentase banyaknya bangunan rumah tidak memenuhi persyaratan pondasi, dinding dan kerangka bangunan, atap serta lantai suatu bangunan rumah tinggal sehat. Semakin banyak rumah dalam suatu lingkungan permukiman yang tidak memenuhi kriteria kebutuhan permukiman semakin kumuh.

Tabel 13.

Tingkat Kualitas dan Kelayakan Bangunan di Kelurahan Buloa

No	Variabel	Jumlah (Unit)	$\frac{RTL}{\sum R} \times 100\%$	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Rumah Dengan Struktur Bangunan Tidak Layak (RTL)	275	21	Kumuh Ringan (KR)	2
2	Jumlah Keseluruhan Bangunan Rumah ($\sum R$)	1.330			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah unit bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan permukiman. Suatu lingkungan permukiman menjadi kumuh salah satunya disebabkan oleh tingkat kepadatan bangunan yang tinggi akibat keterbatasan lahan yang tersedia. Tingkat penilaian adalah membandingkan jumlah bangunan rumah yang ada dengan luas wilayah lingkungan permukiman.

Tabel 14.

Tingkat Kepadatan Bangunan di Kelurahan Buloa

No	Variabel	Jumlah (Unit)	$\Sigma R/W$	Klasifikasi	Bobot
1	Jumlah Bangunan Rumah (ΣR)	1.330	22	Tidak Kumuh (TK)	1
2	Luas Wilayah (W)	61			

Sumber : Kelurahan Buloa Dalam Angka Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

5. Tinjauan Terhadap Kondisi Prasarana

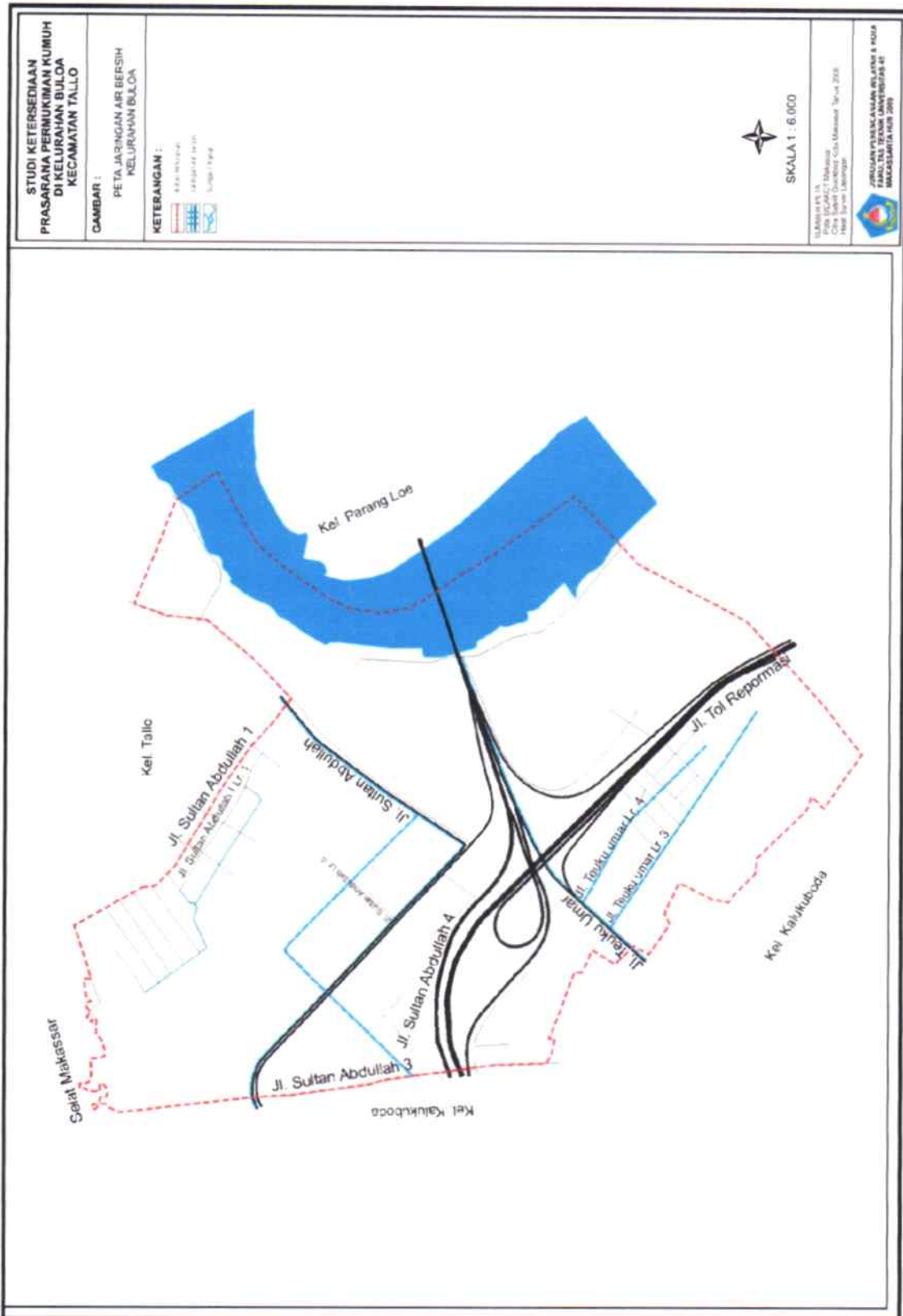
a. Tingkat Pelayanan Air Bersih

Tingkat Pelayanan air bersih adalah persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan air bersih baik yang disuplai oleh PDAM maupun berasal dari sumber air lain, termasuk sumber air setempat (sumur dangkal maupun sumur dalam) atau berasal dari sumber lain di luar lingkungan yang dapat diperjual belikan melalui penjual air bersih (*water vendor*).

Lingkungan permukiman dengan pelayanan air bersih atau akses terhadap air bersih yang terbatas mengindikasikan buruknya kualitas lingkungan permukiman tersebut.

b. Kondisi Sanitasi Lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan dilihat dari persentase jumlah KK yang tidak menggunakan fasilitas jamban keluarga atau jamban umum yang memenuhi syarat teknis *on-site sanitation* (*septic-tank*) dalam satu wilayah. Lingkungan permukiman dengan tingkat penggunaan *septic-tank* setiap rumah rendah mengindikasikan buruknya kondisi sanitasi lingkungan itu.



Gambar 4. Peta Jaringan Air Bersih di Kelurahan Buloa

c. Kondisi Persampahan

Kondisi Persampahan dilihat dari persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah, swasta atau swadaya (terkoordinir) sehingga masyarakat membuang sampah ke sembarang tempat, misalnya sungai, selokan atau tempat terbuka lain dalam suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang membuang sampah ke tempat yang tidak diperuntukkan secara khusus bagi pembuangan sampah, mengindikasikan kondisi lingkungan permukiman yang buruk.

d. Kondisi Jalan

Kondisi jalan di suatu lingkungan permukiman tercermin dari segi kualitas permukaan jalan. Kondisi jalan menurut kualitas permukaannya dikategorikan dalam : baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan di permukiman kumuh pada umumnya tidak memadai dari segi kualitas permukaan, sehingga menghambat pergerakan manusia, kendaraan dan barang.

e. Kondisi Drainase

Kondisi saluran air hujan dilihat dari persentase derajat kelancaran saluran air/drainase dalam suatu wilayah. Derajat kelancaran air pada saluran air/drainase dikategorikan dalam kondisi : lancar, tidak lancar, tergenang dan tidak ada saluran. Semakin banyak saluran yang tidak lancar, tergenang bahkan

tidak ada saluran drainasenya, mencerminkan buruknya suatu lingkungan fisik permukiman. teknik penilaiannya didapat dari perbandingan panjang saluran drainase yang tidak lancar, tergebang atau tidak ada salurannya dengan panjang seluruh saluran drainase.

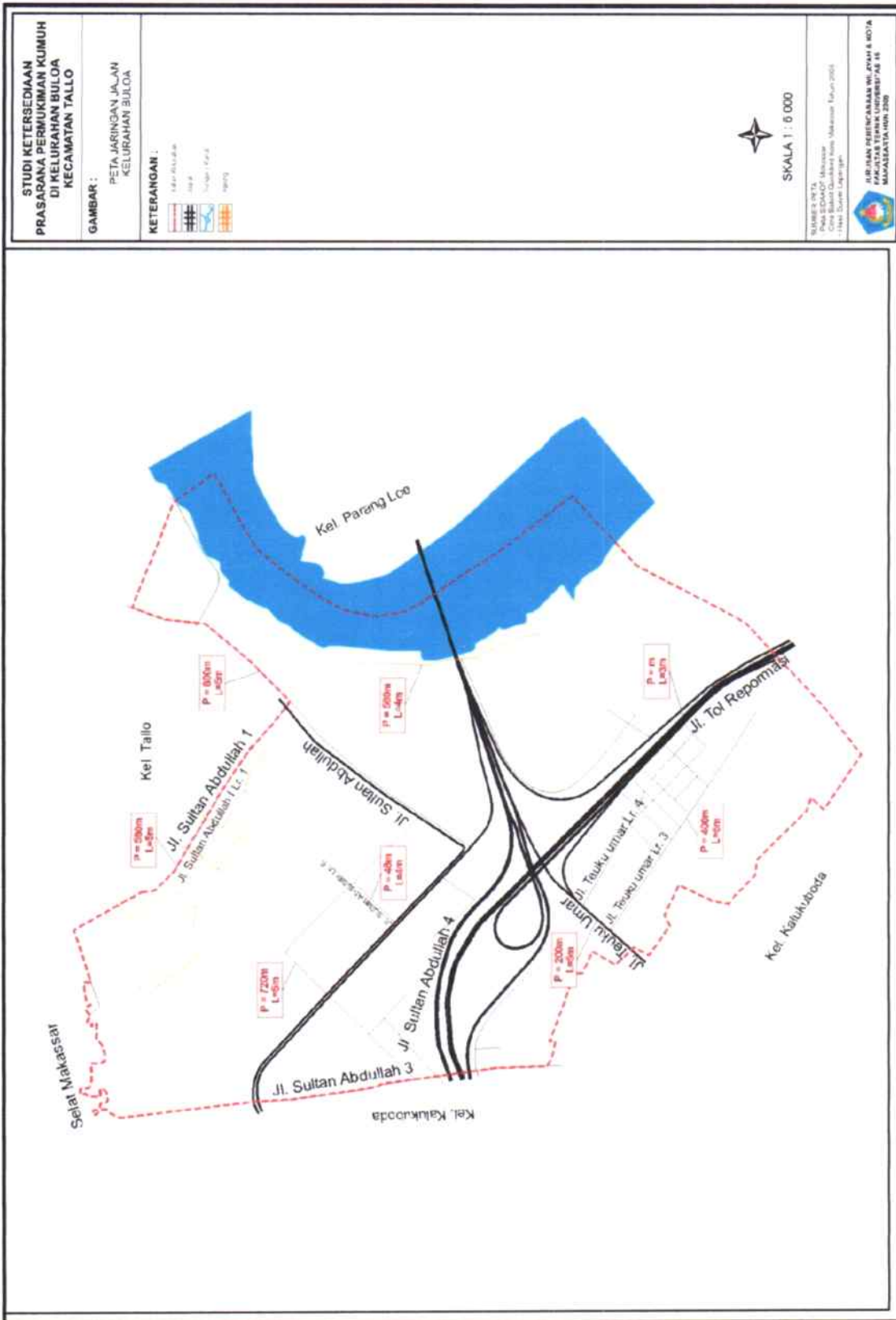
f. Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka di suatu lingkungan permukiman kumuh pada umumnya tidak memadai. Semakin banyak proporsi ruang terbuka pada suatu lingkungan permukiman maka lingkungan tersebut semakin baik.

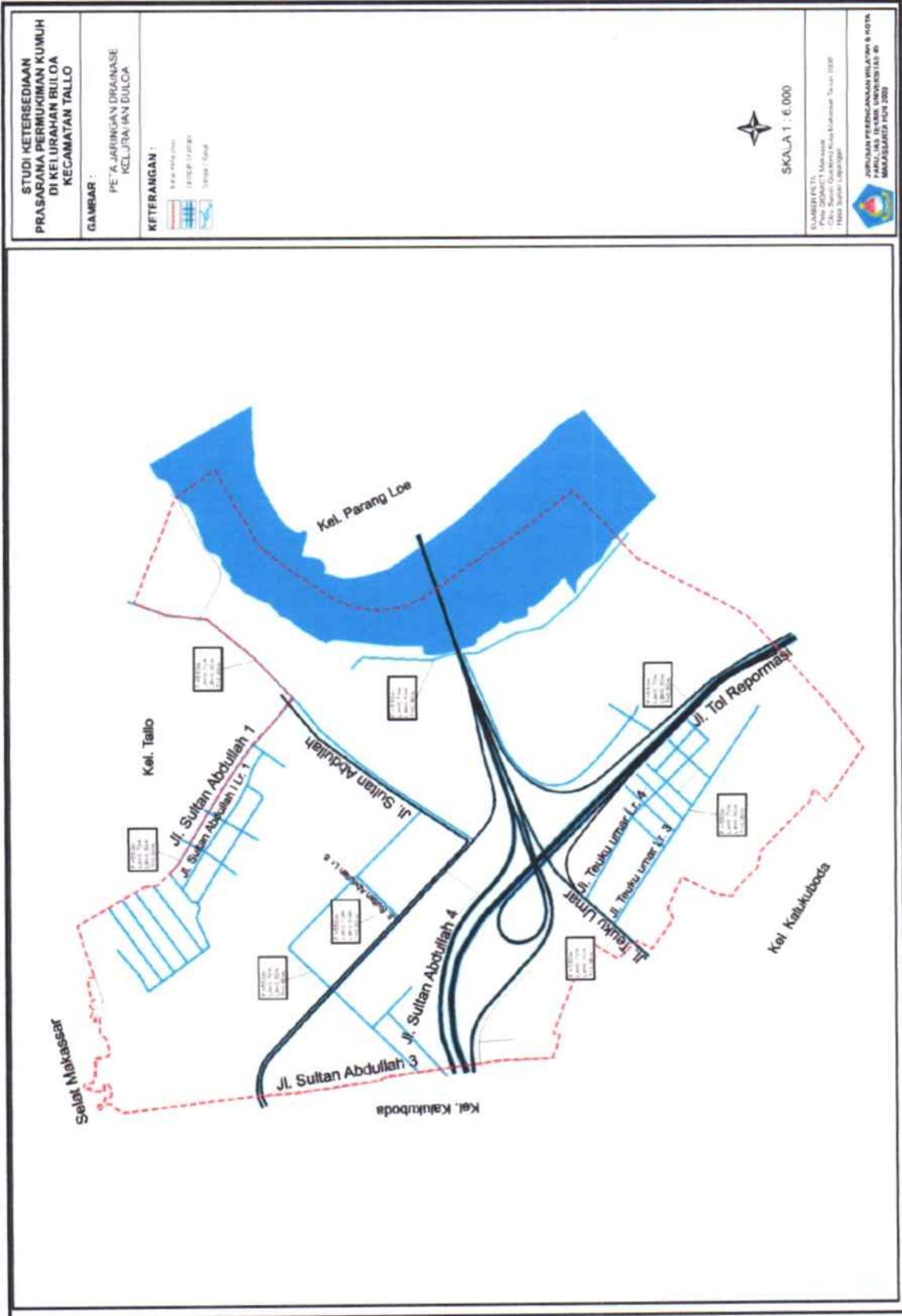
6. Tinjauan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi

a. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga sejahtera karena alasan ekonomi dalam suatu lingkungan permukiman. Semakin banyak jumlah keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera, mengindikasikan kurangnya kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukimannya, yang pada gilirannya akan mengakibatkan masalah kekumuhan.



Gambar 5. Peta Jaringan Jalan Kelurahan Buloa



Gambar 6. Peta Jaringan Drainase Kelurahan Buloja

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dilihat dari persentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun (hingga setingkat SLTP). Semakin banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dapat mencerminkan kurangnya kemampuan penduduk untuk mengakses berbagai sumber daya bagi peningkatan kualitas suatu lingkungan permukiman.

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dilihat dari besarnya pendapatan penduduk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu lingkungan permukiman. dalam hal ini criteria dasar yang digunakan adalah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMP/UMK). Lemahnya sumber daya masyarakat juga dapat diindikasikan dari banyaknya penduduk dengan penghasilan di bawah UMP/UMK. Tingkat pendapatan penduduk dalam suatu lingkungan permukiman dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan penghasilan dibawah UMP/UMK dengan jumlah penduduk keseluruhan dikalikan 100%.

C. Karakteristik Responden

Ditinjau dari letak lokasi penelitian yang dekat dengan fasilitas kota menyebabkan kawasan ini menjadi alternatif bagi kaum pendatang untuk tinggal di wilayah ini. Dari hasil questioner yang diedarkan dapat diketahui bahwa di kawasan penelitian ini penduduk yang mendiami adalah penduduk asli dan pendatang dari berbagai daerah dan terdiri dari berbagai suku. Dimana suku yang dominan yang menempati kawasan ini adalah suku Bugis Makassar, selebihnya adalah suku Mandar, Toraja, dan lainnya, liha tabel 15

Tabel 15.
Jumlah Responded Berdasarkan Asal/Suku

No	Daerah	Jumlah	
		N	%
1	Makassar	41	42,71
2	Bugis	23	23,96
3	Mandar	15	15,62
4	Toraja	11	11,46
5	Lain-Lain	6	6,25
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

Hasil survei yang dilaksanakan pada lokasi penelitian dilakukan pembagian usia responden pada lima kelompok umur yang bermukim di lokasi tersebut, untuk jelasnya lihat tabel 16.

Tabel 16.
Jumlah Responden Menurut Kelompok Usia Kerja

No	Kelompok Umur	Jumlah	
		N	%
1	20 – 30	21	21,88
2	31 – 40	32	33,33
3	41 – 50	29	30,20
4	51 – 60	11	11,46
5	Diatas 60	3	3,13
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

Berdasarkan perbandingan usia responden pada hasil survey dapat dilihat pada tabel 5. Usia produktif antara 31 – 40 tahun (33,33%) dan 41 – 50 tahun (30,20%) menunjukkan jumlah yang dominan, untuk jelasnya lihat tabel 17.

Tabel 17.
Jumlah Responden Berdasarkan Anggota Keluarga Yang Tinggal Dalam Rumah

No	Jumlah Anggota Keluarga dalam 1 Rumah	Jumlah	
		N	%
1	3 Orang	14	14,58
2	4 Orang	26	27,08
3	5 Orang	30	31,26
4	Lebih dari 5 Orang	26	27,08
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

Jumlah anggota keluarga yang menempati setiap hunian dalam lingkungan permukiman sangat bervariasi. Jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tinggal responden mayoritas lebih dari 3 orang.

Jumlah responden yang berpendidikan kurang dari 9 tahun sebanyak 65,62%, dan yang berpendidikan lebih dari 9 tahun sebanyak 34,38%. Ini dapat dikatakan bahwa keadaan tingkat pendidikan responden di perkampungan Lette relatif masih rendah. Ini jika dikaitkan dengan keadaan pekerjaan responden, setidaknya mempunyai keterkaitan dimana pekerjaan yang dilakukan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, tabel berikut :

Tabel 18.**Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Daerah	Jumlah	
		N	%
1	Tidak Tamat SD	19	19,79
2	Tamat SD	44	45,83
3	Tamat SLTP	20	20,83
4	Tamat SLTA	10	10,42
5	Sarjana Muda	3	3,13
6	Sarjana	0	0
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

Berdasarkan karakteristik pekerjaan utama penduduk yang bermukim di kawasan ini, diperoleh jawaban tertinggi 86,45% mempunyai pekerjaan/mata pencaharian pada sektor informal, dimana hal ini dikarenakan tingkat pendidikan responden masih rendah dan pekerjaan ini tidak memerlukan tingkat keahlian yang tinggi. Pekerjaan/mata pencaharian dari responden ini akan berpengaruh pada tingkat penghasilan yang diperoleh (tabel 19)

Tabel 19.**Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Daerah	Jumlah	
		N	%
1	Nelayan	9	9,37
2	Buruh	30	31,25
3	Pedagang Kecil (eceran)	25	26,04
4	Supir	6	6,25
5	Wiraswasta	13	13,54
6	Pegawai Negeri	4	4,18
7	Pegawai Swasta	9	9,37
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

Besarnya tingkat penghasilan responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan masih tergolong

rendah (72,92%), hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan responden yang lebih dominan pada sektor informal (tabel 20).

Tabel 20.

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

No	Daerah	Jumlah	
		N	%
1	< 500.000	7	7,30
2	501.000 – 750.000	33	34,37
3	751.0 – 1.000.000	30	31,25
4	> 1.000.000	26	27,08
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2009

BAB IV

ANILISIS KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PERMUKIMAN KUMUH

A. Analisis Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Buloa

Hal yang hendak ditinjau pada sub bab ini adalah ketersediaan prasarana lingkungan permukiman dalam lokasi penelitian. Prasarana lingkungan permukiman yang ada sekarang, selain dilaksanakan oleh proyek peningkatan kualitas lingkungan juga sebelumnya oleh proyek perbaikan kampung dan peningkatan prasarana perumahan dan permukiman. Prasarana lingkungan yang dimaksud adalah :

1. Jalan

Prasarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam suatu kawasan perumahan dan permukiman, karena dengan adanya jalan dapat mendukung kelancaran pergerakan dari dalam dan keluar kawasan perumahan dan permukiman.

Ketersediaan jalan lingkungan dan jalan setapak didalam kawasan ini adalah sangat tinggi. Jika melihat standar panjang jalan lingkungan dan jalan setapak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang permukiman dan Pengembangan Wilayah (2000). Ketersediaan panjang jalan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21.
Perbandingan Antara Panjang Jalan Lingkungan Dan Setapak
Dengan Standar

No	Klasifikasi Jalan	Standar Minimal (m/ha)	Standart Minimal Kebutuhan (m/7,5 ha)	Panjang Jalan	
				(m)	%
1	Jalan Lingkungan	40-60	300-450	857,7	190,6
2	Jalan Setapak	50-110	375-825	2.699,2	327,2

Sumber : SPM Tahun 2000 dan Hasil Survey Tahun 2009

Berdasarkan tabel 21 menunjukkan bahwa kebutuhan jalan lingkungan untuk permukiman dengan luas lahan 7,5 ha sesuai SPM adalah 300 m sampai dengan 450 m, sementara ketersediaan panjang jalan lingkungan yang ada adalah 857,7 m. Untuk kebutuhan jalan setapak sesuai standar dengan luas lahan 7,5 ha adalah 375 m sampai dengan 825 m, dan panjang jalan setapak yang ada adalah 2.699,2 m. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan panjang jalan lingkungan dan jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian dikategorikan sudah sangat baik.

Untuk lebar badan jalan lingkungan sesuai standar yang dibutuhkan adalah 3,5–5 m dan lebar perkerasan jalan lingkungan 3–4,5 m. Sesuai pengamatan di lapangan, ketersediaan lebar badan jalan yang ada dikategorikan kurang baik dan lebar perkerasan jalan dikategorikan baik. Dapat dilihat dari prosentase lebar badan jalan lingkungan yang sesuai atau lebih besar dari standar (3,5 m), dengan lebar badan jalan yang ada yaitu 4 m – 6 m adalah 59,39%, sedang yang kurang dari standar 40,61%. Untuk lebar perkerasan jalan yang sesuai atau lebih besar dari standar

(3m), dengan lebar perkerasan yang ada yaitu 3 – 6 m adalah 82,15%, dan kurang dari standar (2,5 m) adalah 17,85% (tabel 22).

Tabel 22.
Perbandingan Antara Lebar Badan Jalan Dan Perkerasan Jalan
Dengan Standar SPM Tahun 2000

No	Klasifikasi Jalan	Stand. Lebar jln min.	Lebar badan jalan yg ada	Stand. Lebar perk. min	Lebar perk. Yg ada	Panjang jalan yg ada	Prosen-tase
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)
1	Jalan Sekunder	7	5	6,5	5	145	100
Jumlah						145	100
2	Jalan lingkungan	3,5 - 5	6	3 - 4,5	6	164,4	19,17
			6		5	23,6	2,75
			5		5	31,7	3,69
			4		4	289,7	33,78
			3		3	195,2	22,76
			2,5		2,5	153,1	17,85
Jumlah						857,7	100
3	Jalan Setapak	2 - 3,5	1,5	1,5	1,5	951,7	35,26
			1		1	632,3	23,42
			0,8		0,8	1115,2	41,32
Jumlah						2699,2	100

Sumber : SPM Tahun 2000 dan Hasil Survey Tahun 2009

Tabel 22 juga menunjukkan bahwa kebutuhan untuk lebar badan jalan setapak sesuai standar (2 m – 3,5 m) dan lebar perkerasan jalan (1,5 m). Sesuai dengan pengamatan di lapangan, ketersediaannya dikategorikan tidak memadai karena ketersediaan lebar badan jalan yang ada yaitu 0,8 m – 1,5 m yaitu 100%. Untuk lebar perkerasan jalan yang sesuai dengan standar (1,5 m), ketersediaannya juga dikategorikan tidak baik karena yang ada di lokasi penelitian dengan lebar perkerasan 1,5 m prosentasenya hanya 35,26%, sedang selebihnya yaitu 64,74% tidak sesuai dengan standar minimal.

Untuk material perkerasan jalan lingkungan yang ada pada lokasi penelitian ketersediaanya sudah memadai karena keseluruhan jalan 65 lingkungan yang ada telah diperkeras dengan material berupa paving plock sebanyak 97,25% dan aspal sebesar 2,75% (tabel 12). Ini menunjukkan bahwa material perkerasan jalan lingkungan yang ada dikategorikan sudah sangat baik. Tetapi perlu ada perbaikan, karena di beberapa ruas jalan material perkerasannya sudah rusak.

Material perkerasan jalan setapak yang ada juga sudah sangat memadai, karena jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian keseluruhannya telah diperkeras dengan material berupa rabat beton dengan prosentase sebesar 44,69% dan paving block 55,31%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan material perkerasan jalan setapak yang ada dikategorikan sangat baik (tabel 23).

Tabel 23.

Material Permukaan Jaringan Jalan di Kelurahan Buloa

No	Klasifikasi Jalan	Material Permukaan	Panjang Jalan Yang ada	
			(m)	(%)
1	Jalan Kolektor Sekunder	P.Block	145	100
	Jumlah		145	100
2	Jalan Lingkungan	Aspal	23,6	2,75
		P.Block	834,1	97,25
	Jumlah		857,7	100
3	Jalan Setapak	Rabat	1.206,2	44,69
		P.Block	1.493	55,31
	Jumlah		2.699,2	100

Sumber : Hasil Survey Tahun 2009

Untuk material perkerasan jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian juga perlu ada perbaikan di beberapa ruas jalan,

karena kondisi jalan yang ada sudah pada rusak. Sebagian jalan juga tidak dilengkapi dengan drainase pada sisi kiri kanan jalan.

2. Air Bersih

Air bersih adalah air yang memenuhi syarat untuk keperluan rumah tangga dan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, yang kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak dan termasuk keperluan industri. Oleh sebab itu, lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari jaringan kota, atau jika tidak terdapat jaringan kota, maka harus diusahakan dari sumber lain yang memenuhi persyaratan air bersih. Secara umum ketersediaan air bersih pada lokasi penelitian dapat dikategorikan sudah baik karena sebagian besar warga pada lokasi penelitian telah dijangkau pelayanan air bersih. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber air bersih, dimana sebagian besar warga memperoleh air bersih dari sambungan rumah dari PDAM. Sumber air bersih yang lain adalah melalui sumur.

Tabel 24.

Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Air Bersih

No	Sumber Air Bersih	Jumlah	
		N	%
1	Sambungan rumah PDAM	82	85,42
2	Sumur dan beli	14	14,58
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Dari tabel 24 menunjukkan bahwa warga yang telah dilayani sambungan dari PDAM adalah 85,42%, sedangkan 14,58% adalah

warga yang tidak terlayani sambungan dari PDAM, tetapi cara memperoleh air bersih dengan melalui sumur dan membeli. Kelompok ini adalah warga yang ekonominya tidak mampu untuk biaya penyambungan.

Tabel 25.
Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan Rasa/Tidak Berasa

No	Sumber Air	Rasa				Jumlah	
		Berasa		Tdk Berasa		N	%
		N	%	N	%		
1	PDAM	0	0,00	82	85,42	82	85,42
2	Sumur	6	6,25	8	8,33	14	14,58
Jumlah		6	6,25	90	93,75	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Ketersediaan air bersih ditinjau secara fisik dan kualitas air yang meliputi rasa menunjukkan bahwa secara umum kualitas air yang digunakan oleh responden dikategorikan sangat baik dengan prosentase 93,75% (tabel 26).

Tabel 26.
Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan Berdasarkan Bau/Tidak Berbau

No	Sumber Air	Bau				Jumlah	
		Berbau		Tdk Berbau		N	%
		N	%	N	%		
1	PDAM	0	0,00	82	85,42	82	85,42
2	Sumur	6	6,25	8	8,33	14	14,58
Jumlah		6	6,25	90	93,75	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Ketersediaan air bersih ditinjau secara fisik dan kualitas air yang meliputi bau, juga menunjukkan bahwa secara umum kualitas air yang digunakan oleh responden dikategorikan sangat baik dengan prosentase 93,75% (tabel 27).

Tabel 27.
Pendapat Responden Mengenai Kualitas Air Bersih Berdasarkan
Kejernihan

No	Kualitas Warna	Jumlah	
		N	%
1	Jernih	86	89,58
2	Keruh	10	10,42
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 27 menunjukkan bahwa 89,58% warga mengkonsumsi air bersih yang kualitasnya baik yaitu air yang jernih, sedangkan warga yang masih menggunakan air yang keruh adalah 10,42%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih pada lokasi penelitian yang dikonsumsi oleh warga ditinjau dari segi kualitasnya sebahagian besar sangat baik. Sementara warga yang mengkonsumsi air bersih dengan kualitas kurang baik adalah warga yang berada dekat pesisir pantai dan daerah genangan sehingga mempengaruhi air yang mereka konsumsi.

Kontinuitas air bersih dimana sebaiknya air bersih mengalir selama 24 jam, sehingga jika dibutuhkan oleh warga dapat tersedia setiap saat. Berdasarkan lamanya pengaliran air bersih pada lokasi penelitian dikategorikan sangat baik, karena pengaliran air bersih yang dibutuhkan oleh warga dapat dilakukan setiap saat. Prosentase yang tidak memberi tanggapan adalah 14,58% adalah warga yang tidak menggunakan sambungan rumah.

3. Air Limbah

Pengolahan air limbah merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik bagi lingkungan permukiman. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sumber air limbah rumah tangga pada lokasi penelitian berasal dari limbah bekas cucian, air kamar mandi, dapur dan air limbah yang berasal dari WC. Sistem pembuangan air limbah ini dilakukan secara terpisah, dimana air limbah yang berasal dari bekas cucian, air kamar mandi, dan dapur dibuang melalui saluran tanah ataupun saluran permanen dari rumah ke saluran tersier dalam lingkungan permukiman. Air limbah yang berasal dari WC dibuang ke septictank dan sebagian lagi yang langsung membuang tinja ke WC umum yang berada ditepi pantai.

Jika ditinjau dari prosentase warga yang memiliki MCK, maka ketersediaan prasarana air limbah atau MCK pada lokasi penelitian, digolongkan cukup baik. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah responden yang memiliki MCK sendiri.

Tabel 28.

Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan MCK di Rumah

No	Kepemilikan MCK Individu dengan <i>septictank</i>	Jumlah	
		N	%
1	Ada	81	84,37
2	Tidak Ada	15	15,63
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Dari tabel 28 menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan MCK individu pada lokasi penelitian dapat dikategorikan sudah baik. Ini dapat dilihat dengan prosentase warga yang telah memiliki MCK individu sebesar 84,37%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya membuang tinja pada MCK sendiri untuk mencegah pencemaran lingkungan sehingga tidak berbahaya terhadap kesehatan. Sedangkan warga yang tidak mempunyai MCK sendiri dan membuang tinja pada WC umum sebesar 15,63%. Warga yang masuk dalam kategori ini adalah warga yang bermukim dekat pantai. Juga karena faktor ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka tidak tahu dengan membuang tinja di WC umum yang kondisinya tidak layak dan sumber air tidak ada, dapat mencemari lingkungan dan berbahaya pada kesehatan (gambar 7).

4. Prasarana Sampah

Kebutuhan prasarana Ketersediaan prasarana persampahan dalam lingkungan permukiman dapat ditinjau dari jumlah wadah tempat pembuangan sampah berupa TPS serta pengangkutan sampah berupa jumlah fasilitas pengangkut sampah.

Masalah sampah di Kelurahan Buloa memprihatinkan situasi kebersihan lingkungan. Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian, tidak ada terdapat wadah tempat pembuangan sampah, sehingga terlihat bahwa sampah-sampah banyak berserakan . Sarana persampahan yang ada di Kelurahan Buloa hanya terdapat

1 (satu) buah tempat pembuangan sementara berupa kontainer yang berjarak lebih kurang 150 m dari lokasi penelitian (gambar 9).

Sarana persampahan ini kurang dimanfaatkan oleh responden, ini dikarenakan oleh faktor jarak tempat pembuangan sementara tersebut berada diluar dari lingkungan permukiman dan juga karena faktor tidak adanya sarana pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sementara, sehingga mereka lebih condong membuang sampah pada tempat terdekat.

Sesuai pengamatan di lapangan, warga yang ada disepanjang drainase primer membuang langsung sampahnya pada saluran drainase, mereka berasumsi bahwa arus air akan segera membawa dan mengalirkan sampah tersebut ke laut.

Sebagian warga yang berada di dekat pantai juga memanfaatkannya pesisir pantai sebagai tempat pembuangan sampah, dimana hal ini berkaitan erat dengan kebiasaan warga yang selalu ingin praktis.

Juga pada lahan-lahan kosong disekitar permukiman, dimanfaatkan oleh warga sekitarnya sebagai tempat membuang sampah sehingga membuat lingkungan menjadi kotor.

5. Prasarana Drainase

Penilaian tingkat ketersediaan drainase ditinjau dari dimensi dan panjang saluran serta kondisi drainase. Pada lokasi penelitian ketersediaan drainase ditinjau dari panjangnya termasuk kategori

sangat baik karena total panjang drainase lebih besar dari standar minimal yang ditetapkan yaitu 120 -250 m/ha.

Tabel 29.

Perbandingan Panjang Drainase Terhadap Standar Minimal

No	Standar/ha (m)	Standar Kebutuhan 7,5 ha (m)	Panjang saluran yang ada (m)	Prosentase thd standar (%)
1	150-250	900-1875	3.615,3	192,82

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 29 menunjukkan bahwa kebutuhan untuk prasarana drainase atau saluran air hujan pada lokasi penelitian dengan luas wilayah 7,5 ha sesuai SPM adalah 900 m sampai dengan 1.875 m. Sedangkan ketersediaan panjang drainase yang ada pada lokasi penelitian adalah 3.615,3 m (192,82%). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan panjang drainase yang ada dikategorikan sangat baik.

Sesuai pengamatan di lapangan, juga ada saluran primer yang terdapat pada batas antara Kelurahan Tallo dan Kelurahan Buloa, yang selain berfungsi sebagai saluran pembuangan juga dimanfaatkan sebagai tempat membuang sampah oleh warga sepanjang saluran tersebut yang aliran airnya langsung ke laut.

Sementara saluran tersier yang ada lingkungan permukiman, pada umumnya tidak dapat berfungsi maksimal, disamping karena dimensi yang tidak sesuai dengan standar juga karena kondisi fisik saluran sudah banyak yang rusak.

Saluran yang ada pada kawasan permukiman juga banyak yang tidak berfungsi dikarenakan tingkat kesadaran warga akan

kebersihan yang kurang dengan membuang sampahnya pada saluran yang ada, sehingga membuat saluran tersumbat oleh karena adanya tumpukan sampah yang menyumbat pada ujung saluran sehingga air buangan tidak dapat mengalir.

Berdasarkan dimensi yaitu lebar drainase, untuk ketersediaan yang ada pada lokasi penelitian dapat dikategorikan tidak memadai. Sesuai pengamatan di lapangan, lebar drainase yang sesuai atau lebih besar dari standar (30 cm) dengan lebar 30 cm sampai dengan 60 cm prosentasenya hanya mencapai 36,20%, sementara drainase yang lebarnya lebih kecil dari standar (20 cm) mencapai 63,80%.

Untuk dimensi tinggi atau kedalam drainase yang ada pada lokasi penelitian, yang sesuai atau lebih besar dari standar (40 cm) dengan kedalaman 40 cm sampai dengan 50 cm hanya mencapai 20,17%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaannya dikategorikan tidak baik (tabel 30).

Tabel 30.

Perbandingan Lebar Dan Tinggi/Dalam Drainase Terhadap Standar

No	Lebar		Panjang eksist. (m)	Persentase thd total pjg	Dalam/tinggi		Panjang eksist	Persentase thd total pjg
	Eksist (m)	Stand (m)			Eksist (m)	Stand (m)		
1	0,60	0,30	160,0	4,42	0,50	0,40	160,0	4,42
2	0,50	0,30	569,4	15,75	0,40	0,40	569,4	15,75
3	0,30	0,30	579,4	16,03	0,20	0,40	2886,9	79,83
4	0,20	0,30	2306,5	63,80	-	-	-	-
Jumlah			3615,3	100			3615,3	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Pada lokasi penelitian, permukiman yang ada pada pesisir pantai sama sekali tidak mempunyai saluran pembuangan. Juga pada ajalan lingkungan yang ada, hanya sebagian saja yang mempunyai saluran pada dua sisinya, sehingga permukiman yang tidak mempunyai saluran pembuangan utamanya permukiman daerah pesisir pantai, mengakibatkan air buangan tidak dapat mengalir yang pada akhirnya menimbulkan genangan di kawasan tersebut.

Begitu pula pada jalan setapak yang ada, saluran yang tersedia hanya pada satu sisi jalan, malah ada beberapa jalan setapak yang sama sekali tidak mempunyai saluran pembuangan dan air buangan dari rumah dialirkan melalui saluran tanah, sehingga juga menimbulkan genangan pada daerah sekitarnya.



B. Manfaat Prasarana Lingkungan Permukiman terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan adalah jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang. Oleh karenanya kondisi ketersediaan jalan sangat menentukan baik tidaknya transportasi dalam suatu kawasan permukiman.

Fungsi jalan dalam kawasan kumuh Kelurahan Buloa adalah digunakan untuk keperluan pergerakan masyarakatnya ke berbagai tempat kegiatan sosial ekonomi yaitu untuk mencapai lokasi tempat

kerja dan sebaliknya, untuk mengunjungi tempat perbelanjaan atau pasar, kebutuhan pelajar mencapai sekolah, berinteraksi sosial dengan tetangga, dan untuk mencapai fasilitas kesehatan dan keagamaan.

Tabel 31.
Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan

No	Tempat Tujuan	Jumlah	
		N	%
1	Tempat Kerja	62	64,59
2	Pasar	21	21,87
3	Lainnya	13	13,54
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 31 menunjukkan bahwa penggunaan jalan yang terbesar adalah digunakan warga ke tempat kerja sebesar 64,59%, mengingat mata pencaharian responden yang lokasinya terletak diluar lingkungan permukiman. 21,87% penggunaan jalan yang digunakan ke pasar untuk berdagang bagi yang bermata pencaharian pedagang atau nelayan yang ingin menjual langsung hasil tangkapannya dan bagi warga yang hendak membeli kebutuhan dagangannya. Penggunaan jalan selanjutnya adalah digunakan untuk interaksi sosial seperti berkunjung ke tetangga atau kegiatan lainnya sebesar 13,54%.

Tabel 32.**Penggunaan Jalan Ke Tempat Kerja Dengan Menggunakan Sarana**

No	Penggunaan Sarana ke tempat kerja	N	%
1	Sepeda	21	21,87
2	Becak	5	5,21
3	Motor	36	37,50
4	Angkutan Umum	4	4,17
5	Mobil	3	3,13
6	Jalan kaki	27	28,12
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Dengan adanya prasarana jalan, aktifitas untuk mencapai tempat kegiatan ekonomi responden semakin lancar . Ini dapat dilihat dengan menggunakan sarana oleh responden ,maka selain berjalan kaki juga menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Berdasarkan hasil survei, maka jenis kendaraan yang dianggap warga paling sering melintasi jalan dalam kawasan pemukiman adalah motor dengan prosentase 37,50%, dengan berjalan kaki dan bersepeda sebesar 28,12% dan 21,87%, dikarenakan tempat aktifitas mereka dekat dengan kawasan pemukiman sedangkan penggunaan jalan dengan kendaraan mobil hanya 3,13% (tabel 33), ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah.

Tabel 33.**Penggunaan Jalan Ke Sekolah Dengan Menggunakan Sarana**

No	Penggunaan Jalan bagi anak-anak ke sekolah	N	%
1	Sepeda	14	14,58
2	Motor	19	19,79
3	Angkutan umum	9	9,37
4	Mobil	3	3,13
5	Jalan Kaki	51	53,13
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Penggunaan jalan bagi anak-anak untuk tujuan ke sekolah menunjukkan bahwa 53,13% dengan berjalan kaki, hal ini dikarenakan jaringan jalan menuju ke fasilitas pendidikan sudah tersedia dan juga fasilitas pendidikan ini ada yang terdapat di dalam lingkungan permukiman dan di sekitar lingkungan permukiman sehingga untuk mencapainya anak-anak hanya dengan berjalan kaki. Sedangkan 19,79% menggunakan motor ini dikarenakan fasilitas pendidikan untuk tingkat lanjutan tidak berada didalam lingkungan permukiman tetapi adanya diluar lingkungan permukiman, sehingga untuk mencapainya mereka menggunakan baik itu kendaraan motor, maupun angkutan umum 9,37% (tabel 34).

Tabel 34.
Manfaat Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kegiatan Sosial Responden

No	Kegiatan sosial responden	sering		jarang		Tidak pernah		Jumlah
1	Berhub. Dgn kel & kerabat di luar lingk. Permukiman	43	44,79	30	31,25	23	23,96	96
2	Berhub. Dgn kel & kerabat di lingk. permukiman	77	80,21	16	16,67	3	3,12	96
3	Menikuti acara hajatan	91	94,79	5	5,21	0	0	96

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Manfaat keberadaan prasarana jalan dalam lingkungan permukiman terhadap kegiatan sosial (tabel 34) adalah kegiatan berinteraksi dengan keluarga dekat dan kerabat yang berada diluar lingkungan permukiman menunjukkan bahwa 44,79% sering bertemu dan 31,25% jarang bertemu. Untuk kegiatan berinteraksi dengan keluarga dekat atau kerabat dalam lingkungan permukiman

80,21% sering bertemu, ini menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana jalan dalam lingkungan permukiman memberi manfaat terhadap interaksi warga dalam lingkungan permukiman. Untuk kegiatan mengikuti acara hajatan 94,79% responden dapat menghadiri kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan akses untuk mencapai tempat kegiatan dalam lingkungan permukiman telah dilalui jaringan jalan.

Manfaat lain dengan ketersediaan prasarana jalan dalam lingkungan permukiman adalah memberi peluang kepada warga dalam peningkatan pendapatan dengan membuka usaha dagang/warung untuk penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan usaha angkutan ojek untuk sarana transportasi warga dari dan keluar lingkungan permukiman. Hal ini dapat dilihat pada tabel 35, dimana sebagian responden mengatakan dapat membuka usaha adalah 44,79%, kondisi tersebut dimungkinkan karena faktor pendistribusian barang dagangan langsung ke dalam lingkungan permukiman.

Tabel 35.

Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Responden Untuk Membuka Usaha

No	Keberadaan prasarana jalan terhadap responden untuk membuka usaha	N	%
1	Dapat	43	44,79
2	Tidak Dapat	36	37,50
3	Tidak menjawab	17	17,71
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan responden yang mengatakan dengan tersedianya prasarana jalan, membuat mereka dapat membuka usaha warung/kios untuk kebutuhan sehari-hari dari warga yang tidak perlu lagi keluar dari lingkungan permukiman. Dan usaha angkutan ojek untuk sarana pengangkutan warga dari dan keluar lingkungan permukiman yang berakibat juga pada kenaikan pendapatan dari warga meningkat.

Kenaikan pendapatan rumah tangga tidak lepas dari lapangan kerja yang terbuka dengan adanya prasarana jalan. Pendapatan rumah tangga yang dimaksud adalah dalam penelitian ini adalah pendapatan kepala keluarga. Kenaikan pendapatan keluarga sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan.

Tabel 36.

Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kenaikan Pendapatan

No	Keberadaan prasarana jalan terhadap kenaikan pendapatn	N	%
1	Naik	39	42,62
2	Kurang Naik	40	41,67
3	Tidak Naik	17	17,71
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 36 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan warga masyarakat setelah adanya prasarana jalan. Hal ini sesuai wawancara dengan responden, bahwa dengan adanya prasarana jalan untuk kelancaran transportasi lalu lintas dan perekonomian warga masyarakat sangat terkait dengan peningkatan pendapatan

keluarga. Ini dapat dilihat bahwa 40,62% menyatakan dengan adanya prasarana jalan dapat meningkatkan pendapatannya.

2. Air Bersih

Aktifitas warga masyarakat dalam suatu kawasan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor komponen fisik lingkungan. Diantaranya yang turut mempengaruhinya adalah prasarana air bersih, yang dapat mendukung dan meningkatkan mutu lingkungan kehidupan masyarakat di kawasan permukiman. Air bersih sebagai kebutuhan pokok dalam lingkungan permukiman di lokasi penelitian sudah dikonsumsi oleh masyarakat, dimana 85,42% (tabel 13) responden telah menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih.

Dari hasil survei dilokasi penelitian menunjukkan bahwa air bersih yang diperoleh dari sambungan rumah PDAM dipergunakan warga menunjukkan bahwa dari setiap rata-rata 82 dari 96 responden atau 85,42% memanfaatkan air bersih untuk kegiatan rumah tangga seperti masak, mandi maupun mencuci. Pemakaian air perhari dalam lingkungan permukiman bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah penghuni dalam setiap rumah dan jenis kegiatan/aktifitas warga.

Tabel 37.**Rata-Rata Pemakaian Air Perhari Dari Responden**

No	Rata-rata pemakaian setiap hari	Jumlah	
		N	%
1	Kurang dari 100 liter	7	8,54
2	100 – 200 liter	19	23,17
3	200 – 300 liter	30	36,58
4	Lebih dari 300 liter	26	31,71
Jumlah		82	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Air bersih yang dikonsumsi oleh warga masyarakat pada lokasi penelitian kualitasnya sudah baik (tabel 37 dan 38) , sehingga mereka tidak mudah diserang penyakit . Biasanya pada musim tertentu saja warga masyarakat diserang penyakit. Penyakit yang sering diderita adalah penyakit pemapasan, penyakit kulit dan penyakit diare. Tanggapan responden mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 38 berikut.

Tabel 38.**Tanggapan Responden Yang Pernah Diserang Penyakit Terhadap Kualitas Air**

No	Kualitas air	Pernah terserang penyakit						Jumlah	
		sering		jarang		Tidak pernah		N	%
		N	%	N	%	N	%		
1	Baik	0	0	7	7,29	75	78,13	82	85,42
2	Kurang baik	2	2,08	5	5,21	7	7,29	14	14,58
Jumlah		2	2,08	12	12,50	82	85,42	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Dalam tabel 38 tampak bahwa pernyataan responden yang menyatakan tidak pernah terserang penyakit mencapai 85,42%, sedangkan yang menyatakan sering hanya 2,08%. Indikasi yang dapat dikemukakan bahwa kualitas air bersih masyarakat kurang higienis, namun karena sudah biasa mengonsumsi air sumur,

sudah tidak terpengaruh terhadap kesehatan mereka. Juga karena prasarana air bersih yang dimiliki warga masyarakat yang dekat dengan pantai sehingga kualitas air bersih tidak dapat dijamin bebas dari penyakit.

3. Air Limbah

Pengolahan air limbah merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik dalam lingkungan permukiman juga pada lingkungan permukiman di Kelurahan Buloa. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Dari hasil survei dilokasi penelitian menunjukkan bahwa dari 96 responden 81 diantaranya atau 84,37% responden memiliki MCK individu dengan sistem pengolahan limbah (septic tank) dan selebihnya yaitu 15,63% tidak memiliki MCK sendiri, tetapi menggunakan WC umum yang kondisinya tidak layak dan tidak mempunyai sumber air bersih serta sistem pengolahan limbahnya langsung mengalir ke laut/pantai (tabel 17). Pada lokasi penelitian, sesuai pengamatan di lapangan warga masyarakat yang memiliki MCK sendiri umumnya masih dalam kondisi baik. Untuk mengetahui kondisi MCK, tabel berikut menunjukkan tanggapan responden.

Tabel 39.
Tanggapan Responden Terhadap Kondisi MCK Sendiri

No	Kondisi prasarana MCK	Jumlah	
		N	%
1	Rusak	2	2,08
2	Masih layak pakai	21	21,87
3	Baik	58	60,42
4	Tidak ada	15	15,63
Jumlah		96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Berdasarkan tabel 39 diketahui bahwa responden menanggapi kondisi prasarana MCK sendiri masih baik 60,42%, sedangkan yang rusak hanya 2,08%.. Selain itu terdapat 15,63% responden menyatakan tidak ada (tidak memiliki MCK sendiri). Ini menunjukkan bahwa kondisi MCK sendiri masih banyak yang baik dibandingkan dengan yang rusak. Selain itu, tampak pula bahwa masih ada warga masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri, khususnya warga masyarakat yang tinggal dekat pesisir pantai.

Dalam hal ini, secara teoritik konsepsional suatu kawasan permukiman dikatakan layak huni apabila setiap keluarga memiliki prasarana sanitasi (WC) yang memenuhi syarat-syarat teknis seperti konstruksi, ukuran dan kedalaman serta jaraknya dari sumber air minimal 10 meter untuk yang menggunakan septiktank sebagai tempat peresapan.

Pada lokasi penelitian, warga masyarakat yang tidak memiliki MCK sendiri secara dominan disebabkan oleh faktor ekonomi (keterbatasan dana untuk pengadanan prasarana MCK), faktor lahan

yang tidak ada maupun karena faktor penggunaan dan pemeliharaan susah . Juga karena faktor tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak tahu dengan membuang tinja pada WC umum yang kondisinya tidak layak dan sumber air tidak ada.

Untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, sesuai pengamatan dilapangan dibuang oleh masyarakat dengan memanfaatkan saluran yang ada didepan rumah, baik saluran yang permanen maupun saluran tanah.

Tabel 40.

Alasan Sehingga Belum Memiliki MCK Sendiri Dari Responden

No	Alasan belum memiliki MCK sendiri	Jumlah	
		N	%
1	Tidak ada biaya	7	46,67
2	Tidak ada tempat	6	40,00
3	Penggunaan dan pemeliharaan susah	2	13,33
Jumlah		15	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

4. Prasarana Persampahan

Sesuai hasil survei menunjukkan bahwa warga di lokasi penelitian hanya sebagian yang membuang sampah pada wadah pengumpulan berupa tempat pembuangan sementara (TPS), dan sebagian lagi membuang sampah di saluran drainase, di pesisir pantai dan dilahan kosong disekitar tempat tinggal warga.

Tabel 41.
Tanggapan Responden Terhadap Cara Pengelolaan Sampah

No	Cara pengelolaan tempat sampah rumah tangga	N	%
1	Dibuang ke TPS	43	44,79
2	Dibuang ke laut/pantai	28	29,17
3	Dibuang ke saluran	14	14,58
4	Dibuang ke tanah kosong	11	11,46
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 41 menunjukkan 44,79% responden membuang sampah pada tempat pembuangan sementara (TPS). Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang ada. Selebihnya yaitu 55, 21% membuang sampah ke laut, ke saluran dan ke tanah kosong disekitar permukiman. Yang masuk dalam kelompok ini adalah warga yang kurang menyadari dengan membuang sampah pada tempat sekitarnya dapat mencemari lingkungan dan bahaya pada kesehatan.

Hal yang membuat masyarakat juga sehingga tidak membuang sampah di tempat pembuangan sementara disebabkan karena faktor jarak untuk mencapai tempat pembuangan sementara yang jauh (tabel 42) dan berada diluar lingkungan permukiman responden serta tidak adanya sarana pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sementara.

Tabel 42.

Jarak Ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

No	Jarak rumah ke TPS	N	%
1	Kurang dari 50 meter	19	19,79
2	50 – 100 meter	46	47,92
3	Lebih dari 100 meter	31	32,29
Jumlah		96	100

Tabel 42 menunjukkan bahwa 19,79% yang mempunyai jarak rumah ke TPS kurang dari 50 m, 47,92% mempunyai jarak 50 m – 100 m dan 32,29% mempunyai jarak lebih dari 100 m, Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat tidak membuang sampahnya ke tempat pembuangan sementara.

Cara pengangkutan sampah warga dari rumah ke tempat pembuangan sementara (TPS) pada lokasi penelitian, dengan menggunakan kantong plastik yang dibawa sendiri oleh masyarakat karena sarana pengangkutan sudah tidak ada lagi. Dimana waktu pengangkutan ke tempat pembuangan sementara oleh warga dilakukan setiap hari. Adapun pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) dilakukan oleh pemerintah kota dengan menggunakan mobil truk dengan frekuensi pengangkutan setiap hari.

5. Prasarana Drainase

Drainase berguna untuk menjaga agar lingkungan tidak tergenang oleh air hujan. Pada lokasi penelitian sistem drainase yang digunakan adalah sistem tercampur dimana pembuangan air

hujan dan air limbah menjadi satu. Sehingga saluran drainase tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari lingkungan ke tempat pembuangan/badan penerima, tetapi juga menampung dan mengalirkan air limbah dari rumah tangga. Air limbah rumah tangga maupun air hujan dari pekarangan dialirkan dari saluran permanen maupun saluran tanah langsung ke laut/pantai atau ke saluran tersier dala lingkungan permukiman dan selanjutnya dialirkan kelaut/pantai.

Dari hasil survei juga menunjukkan bahwa aliran air dalam drainase kurang lancar, dimana prosentase responden yang menyatakan kurang lancar adalah 57,30% (tabel 43). Alasan warga yang menyebabkan aliran kurang lancar antara lain drainase yang tersumbat oleh tumpukan sampah, dimensi saluran kecil, juga karena OP dari warga yang kurang baik , dengan prosentase yang sebanding antara ketiga alasan tersebut.

Tabel 43.

Tanggapan Responden Terhadap Kelancaran Aliran Drainase

No	Tingkat kelancaran air	Penghambat aliran drainase						Aliran lancar		jumlah	
		tersumbat		OP yang kurang		Dimensi kecil		N	%	N	%
		N	%	N	%	N	%				
1	Lancar	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	20,83	20	20,83
2	Kurang lancar	18	18,75	20	20,83	17	17,72	0	0,00	55	57,30
3	Tdk mengalir	8	8,33	6	6,25	7	7,29	0	0,00	21	21,87
	Jumlah	26	27,08	26	27,08	24	25,01	20	20,83	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Akibat sistem pengaliran drainase yang kurang lancar, maka pada saat musim hujan, sebagian lingkungan permukiman pada lokasi penelitian mengalami genangan, yang ditunjukkan prosentase responden yang menyatakan agak tergenang adalah 22,92% (tabel 44).

Tabel 44.
Deskripsi Responden Terhadap Kelancaran Kegiatan Sosial (Ke Sekolah) Dengan Adanya Genangan

No	Tingkat genangan	Kelancaran kegiatan sosial (kesekolah)						Jumlah	
		Tetap berangkat		Menunda keberangkatn		Tdk jadi berangkat			
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	Banjir/sangat tergenang	4	4,16	9	9,37	3	3,13	16	16,66
2	Agak tergenang	17	17,71	5	5,21	0	0	22	22,92
3	Tidak tergenang	58	60,42	0	0	0	0	58	60,42
	Jumlah	79	82,29	14	14,58	3	3,13	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Tabel 44 menunjukkan bahwa walaupun ada genangan namun keinginan warga untuk berangkat sekolah atau kegiatan sosial lainnya tetap ada yaitu 21, 87%, sedangkan yang menunda berangkat adalah 14,58% dan hanya 3,13% yang tidak jadi berangkat ke sekolah.

Tabel 45.
Deskripsi Responden Terhadap Kelancaran Kegiatan Ke Tempat Kerja Dengan Adanya Genangan

No	Tingkat genangan	Kelancaran kegiatan sosial (ke sekolah)						Jumlah	
		Tetap berangkat		Menunda keberangkatn		Tdk jadi berangkat			
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	Banjir/tergenang	8	8,32	5	5,21	3	3,13	16	16,66
2	Agak tergenang	20	20,84	2	2,08	0	0	22	22,92
3	Tidak tergenang	58	60,42	0	0	0	0	58	60,42
	Jumlah	86	89,58	7	7,29	3	3,13	96	100

Sumber : Hasil Survey Dan Analisis Tahun 2009

Keinginan warga untuk tetap berangkat ke tempat kerja juga nampak pada tabel 45. Prosentase responden yang memilih tetap berangkat ke tempat kerja walaupun tergenang adalah 29,16%, sedangkan yang menunda keberangkatan adalah 7,29%. Hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka warga tetap berangkat ke tempat kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan prasarana di lingkungan permukiman kumuh Kelurahan Buloa, berupa jaringan jalan, drainase, prasarana persampahan air bersih dan air limbah (MCK) secara kuantitas dapat dikategorikan masih kurang memadai, sehingga memerlukan peningkatan kualitas terutama untuk jaringan jalan, drainase, persampahan dan limbah rumah tangga.
2. Manfaat prasarana lingkungan permukiman terhadap aspek sosial dan ekonomi yaitu :
 - a. Manfaat prasarana yang ada terhadap aspek sosial ditunjang oleh ketersediaan jaringan air bersih, jaringan drainase, prasarana persampahan dan prasarana air limbah (MCK).
 - b. Manfaat prasarana yang ada terhadap aspek ekonomi ditunjang oleh ketersediaan jaringan jalan yang dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap pencapaian tempat kerja.

B. Saran – Saran

Dalam penyediaan prasarana lingkungan permukiman pada kawasan tersebut diharapkan :

1. Diperlukannya peningkatan kualitas jaringan jalan pada beberapa ruas berupa pengaspalan pada jalan-jalan utama dan pemasangan paving blok pada jalan lingkungan dan jalan setapak
2. Peningkatan kualitas jaringan drainase untuk memudahkan dalam pengaliran air hujan dan buangan rumah tangga
3. Perlu dibuatkan *septictank* komunal untuk memudahkan dalam pengolahan limbah (pembuangan ke IPLT)

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. 2006. *Pemukiman Kumuh di Perkotaan*, Unhas Press, Makassar
- Anonim, 2002, *Konsep Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan*, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
- Arikunto S, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Perkotaan dan Wilayah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budihardjo E, 2006, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Consuelo G. Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dirjen Perumahan dan Pemukiman, Departemen Kimpraswil, 2002, *Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman*, Jakarta.
- Dirjen Perumahan dan Pemukiman, Departemen Kimpraswil, 2002, *Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kumuh*, Jakarta.
- Departemen PU, Kepmen Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986, *Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan*, Jakarta.
- Komarudin, 1996, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*, Yayasan Realestate Indonesia, Jakarta.
- Kodoatie.R.J. 2002. *Banjir "Beberapa Penyebab dan Pengendaliannya"*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Koestoer. R.H. 1996. *Penduduk dan Aksesibilitas Kota*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Oskar Lewis, 1984, *Kemiskinan Kota*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Parlindungan, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung.

- Rudi Y, 2000, *Upaya Pemahaman Standart Kekumuhan Berdasarkan Jenis Dan Model Permukiman Kumuh Di Surabaya*, Tesis Prodi Arsitektur, ITS Surabaya.
- Sumampouw. I. F, 2003, *Identifikasi Tingkat Kekumuhan dan Upaya Penataan Permukiman di Kota Manado*, Tesis Prodi MAP. PPS. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sinulingga, D.,B., 1999. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tjuk Kuswartojo, 2005, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, ITB Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992, *Tentang Perumahan dan Permukiman*, Jakarta
- Usman. S. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Yudohusodo S, dkk, 1991, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Inkoppol, Jakarta.
- Yunus. H.S. 2005. *Klasifikasi Kota*. Pustaka Pelajar Yogyakarta



Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan



Kondisi jaringan jalan yang memerlukan penanganan dan prasarana pembuangan sampah



Lingkungan permukiman yang memerlukan penataan jaringan jalan



Kondisi jaringan jalan yang sudah mengalami perbaikan, tapi belum optimal, dan memerlukan penanganan



Kondisi jaringan jalan dan lahan kosong yang dijadikan pembuangan sampah



Lingkungan permukiman yang belum jaringan drainase



Kondisi jaringan jalan yang sudah mengalami perbaikan



Lingkungan Permukiman belum memiliki jaringan drainase dan pembuangan sampah





Kondisi Jaringan Jalan yang memerlukan penanganan



Lingkungan permukiman yang memerlukan jaringan jalan



Kondisi jaringan jalan yang sudah mengalami perbaikan



Jalur yang menghubungkan permukiman penduduk, tapi belum terbentuk jaringan jalan

